

KONSEP PELESTARIAN KAWASAN TROWULAN

**DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

2009

DAFTAR ISI

BAB I	LATAR BELAKANG	
A	Kerangka Pikir	1
B	Maksud dan Tujuan	4
C	Kerangka Metodologis	5
BAB II	WARISAN BUDAYA MAJAPAHIT DAN NILAI PENTINGNYA	
A	Rona Lingkungan Alam	6
B	Sejarah Singkat Kerajaan Majapahit	8
C	Sekilas Awal Penelitian Tinggalan Majapahit	10
D	Warisan Budaya Tak Bendawi	12
E	Warisan Budaya Bendawi	15
F	Nilai Penting	17
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS	
A	Masalah Lingkup Keruangan	23
B	Keragaman Warisan Budaya	28
C	Kepemilikan Lahan	29
D	Matapencarian Penduduk	30
E	Tekanan Pembangunan	33
F	Kesadaran Pemerintah dan Masyarakat	35
G	Kebijakan Pelestarian	36
BAB IV	KONSEP PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	
A	Konsep-Konsep Dasar	39
B	Visi dan Misi	45
C	Kebijakan Umum	46

BAB V	KEBIJAKAN KHUSUS DAN ARAHAN PROGRAM PELESTARIAN	
A	Kebijakan Khusus Pelestarian Kawasan	56
B	Kebijakan Khusus Pelestarian Fitur dan Situs	61
C	Kebijakan Khusus Pelestarian di Museum Ruang	64
D	Penanganan Masalah Utama	69

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Kerangka Pikir

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu 'ikon' penting sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Hampir seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengetahui tentang keberadaan kerajaan Majapahit yang dipahami sebagai kerajaan yang pernah berkuasa hampir di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan, kerajaan ini juga amat dikenal di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Citra Kerajaan Majapahit sebagai pemersatu Nusantara telah mengangkat kerajaan ini seakan menjadi model bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai perangkat kenegaraan di negara ini diilhami oleh karya-karya budaya masyarakat Majapahit yang berkembang sejak abad ke-13 hingga abad ke-15. Tidak mengherankan jika di berbagai pelosok negara ini, nama-nama tokoh yang terkait dengan Kerajaan Majapahit seperti Hayamwuruk, Gadjah Mada, dan Brawijaya diabadikan menjadi nama lembaga atau pun jalan. Buku-buku pun mencatat kerajaan ini sebagai kerajaan yang terpenting dalam sejarah kepulauan Indonesia.

Sebagai kerajaan besar tentu saja banyak karya budaya yang telah dihasilkan dan ditinggalkan oleh Kerajaan Majapahit. Tinggalannya tersebar luas, terutama di Jawa Timur. Namun, hingga kini Desa Trowulan di Kabupaten Mojokerto diketahui sebagai kawasan yang paling padat mengandung tinggalan-tinggalan Majapahit. Bahkan, ada beberapa ahli yang menduga kuat daerah ini pernah menjadi pusat kerajaan Majapahit (a.l. Maclaine Pont, 1924; Hadimulyo, 2007; Muljana, 1983; Munandar, 2008). Dugaan



Gambar 1. Candi Brahu

ini didasari oleh temuan tinggalan-tinggalan arkeologi yang amat padat di kawasan ini. Karena itu, Trowulan dianggap sebagai salah satu tinggalan atau warisan budaya yang amat penting dari Kerajaan Majapahit.

Kejayaan dan kemegahan Kerajaan Majapahit yang hingga kini masih diyakini oleh kebanyakan masyarakat tentu akan pudar apabila generasi-generasi mendatang tidak lagi dapat melihat warisan budaya bendawinya sebagai bukti-bukti nyata keberadaan kerajaan ini. Tanpa ada bukti-bukti tersebut, sejarah Kerajaan Majapahit hanya akan tinggal menjadi dongeng atau legenda saja. Di sisi yang lain, beragam warisan budaya Kerajaan Majapahit itu kini terancam kehancuran karena berbagai kegiatan. Kegiatan penduduk setempat yang mengolah tanah untuk pertanian dan pembuatan bata, misalnya, seringkali mengakibatkan rusaknya tinggalan Majapahit yang ada di bawah permukaan tanah. Bahkan tidak jarang, kegiatan pembangunan seperti pembuatan jalan atau industri juga memberikan dampak negatif bagi kelestarian tinggalan-tinggalan tersebut. Belum lagi, ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menggali warisan budaya itu untuk dimiliki atau diperdagangkan. Ironinya, upaya untuk memanfaatkan dan mengangkat kembali kejayaan Majapahit justru berdampak kurang menguntungkan. Keadaan ini tentunya saja tidak menguntungkan bagi kelestarian warisan budaya Majapahit yang ada di kawasan Trowulan.

Tentu kondisi seperti itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama terjadinya hal itu adalah tidak adanya konsep, kebijakan, dan program pelestarian yang jelas dan terarah. Meskipun pemerintah sesungguhnya pernah menyusun Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan, dalam kenyataannya tidak banyak diketahui oleh pengelolaan tinggalan Majapahit, apalagi oleh masyarakat. Karena itu, tidak ada paduan atau pedoman yang dipakai oleh para pengelola sebagai arahan dalam proses pelestarian kawasan Trowulan. Ketiadaan arahan pelestarian telah menyebabkan banyak tinggalan Kerajaan Majapahit yang justru mengalami kerusakan.

Menyadari hal tersebut, Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan penataan kembali pelestarian tinggalan Majapahit merasa perlu untuk menyusun Kebijakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Majapahit ini.



Gambar 3. Kerusakan situs akibat kegiatan masyarakat

Kebijakan ini sebenarnya masih merupakan konsep dasar, sehingga hanya merupakan butir-butir pemikiran yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam program-program yang lebih nyata. Selain itu, penyusunan kebijakan ini merupakan Tahap I karena dapat dianggap sebagai langkah awal penyusunan kebijakan yang lebih rinci di kemudian hari.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memberikan arahan atau pedoman pelestarian tinggalan Majapahit yang ada di Kawasan Trowulan. Dengan adanya kebijakan yang dapat dijadikan panduan pelestarian tinggalan Majapahit di kawasan ini, semua pihak yang terlibat akan dapat mengarahkan kegiatannya sesuai dengan arahan tersebut, sehingga pelestarian dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terpadu.

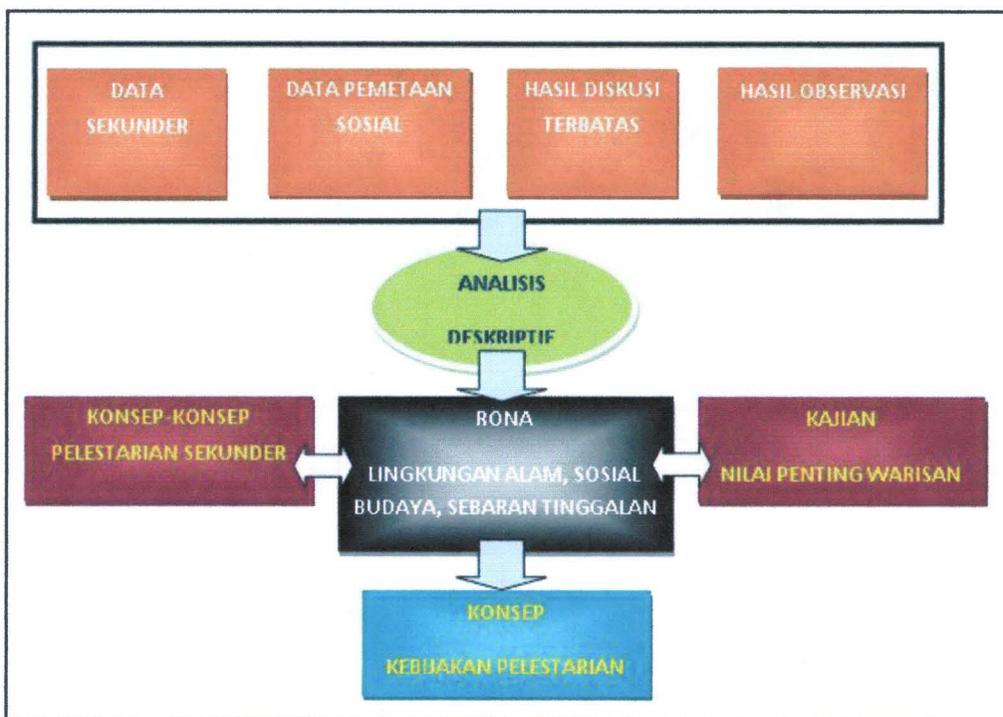
Adapun tujuan penyusunan kebijakan ini, terutama adalah untuk *merumuskan kembali garis-garis besar kebijakan pelestarian yang dapat menjadi pedoman atau rujukan bersama dalam mengarahkan, melaksanakan, dan mengendalikan upaya-upaya pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan*. Kebijakan pelestarian itu sendiri tidak semata-mata ditujukan untuk melestarikan tinggalan-tinggalan bendawi Majapahit, tetapi lebih ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai penting seluruh warisan budaya Majapahit, baik yang bersifat tak-bendawi maupun yang bendawi. Pelestarian tidak hanya ditujukan untuk pelestarian, tetapi juga mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan yang disusun ini tidak hanya terbatas pada perlindungan bukti-bukti bendawi budaya Majapahit, tetapi juga menyangkut penyajian nilai-nilai penting warisan budaya itu bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat setempat.

C. Kerangka Metodologis

Penyusunan konsep kebijakan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Majapahit ini dilakukan dalam rangka evaluasi dan rehabilitasi pelestarian situs dan tinggalan Majapahit. Untuk itu, perlu diperoleh gambaran tentang keadaan pelestarian di masa lampau dan tentunya keadaan pada saat ini. Informasi tentang pelestarian hingga beberapa saat lalu dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang dapat diperoleh. Sebenarnya untuk mendapatkan gambaran kondisi pelestarian di masa kini, dibutuhkan data lapangan yang terbaru melalui pengumpulan data langsung. Namun, karena waktu yang terbatas waktu untuk pengumpulan data langsung di lapangan dan tugas dari tim evaluasi yang terbatas, pengumpulan data di lapangan tidak dapat dilakukan secara tuntas. Untuk melengkapi data yang dapat diperoleh melalui sumber data sekunder, dilakukan pula observasi di lapangan, diskusi terbatas dengan berbagai pihak, dan pemetaan terbatas. Diharapkan, data yang lebih terinci dan baru akan dapat diperoleh dalam penyusunan kebijakan Tahap II.

Semua data yang diperoleh pada tahap ini dianalisis untuk dapat memperoleh rona lingkungan alam, sosial budaya, serta sebaran tinggalan budaya bendawi Majapahit. Hasil analisis memberikan gambaran yang cukup nyata tentang keadaan di masa kini dan dapat dijadikan pengetahuan dasar untuk menyusun kebijakan pelestarian. Untuk merumuskan konsep pelestarian, rona lingkungan alam, sosial budaya, dan sebaran tinggalan kemudian disintesis dengan hasil kajian tentang nilai penting warisan budaya Majapahit dan konsep-konsep pelestarian yang menjadi kerangka pikir dalam menentukan kebijakan. Akhirnya, sintesa tersebut dapat menghasilkan rumusan tentang konsep kebijakan yang merupakan tujuan kegiatan ini (lihat bagan di bawah ini).

BAGAN ALIR PERUMUSAN KONSEP KEBIJAKAN PELESTARIAN



BAB II

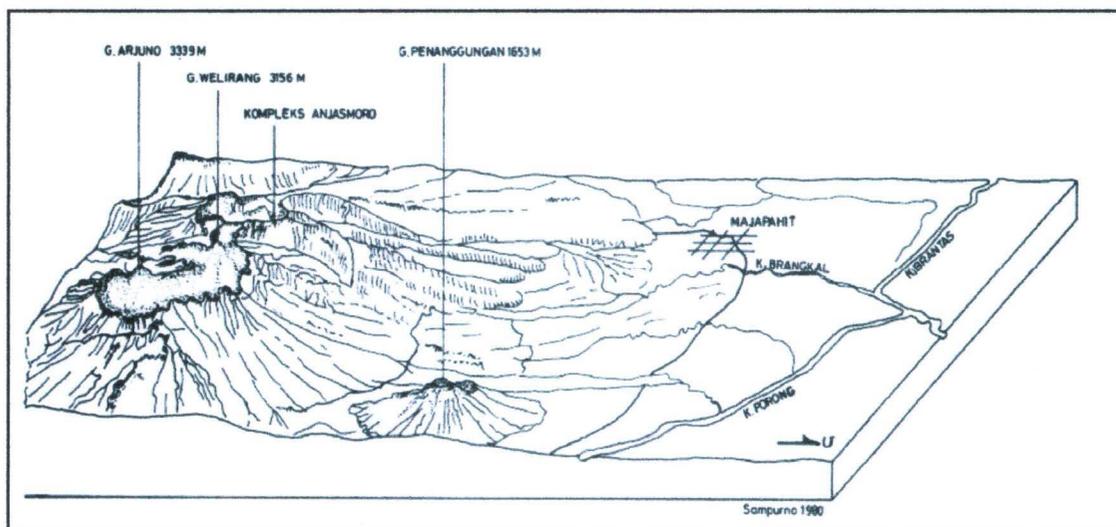
WARISAN BUDAYA MAJAPAHIT DAN NILAI PENTINGNYA

A. RONA LINGKUNGAN ALAM

Sejauh ini sebaran tinggalan arkeologis warisan budaya Majapahit yang cukup padat terdapat di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, berbagai temuan tinggalan Majapahit juga ditemukan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang ada di sebelah baratnya. Penelitian arkeologis terdahulu menunjukkan kerapatan temuan paling tinggi ada di kawasan Trowulan dengan luas sekitar 10 km x 10 km. Karena itu, banyak ahli menduga kawasan ini merupakan pusat kota Kerajaan Majapahit.

Kawasan padat temuan di Kecamatan Trowulan yang luasnya sekitar 100 km², secara astronomis berada pada koordinat 112° 18' – 112° 28' Bujur Timur dan 7° 30' – 7° 40' Lintang Selatan. Kawasan ini berada pada bentang alam yang relatif datar dan secara geomorfologis merupakan bagian bawah kipas aluvial Jatirejo yang membentuk dataran fluvio vulkanik. Material vulkanik diperoleh dari limpasan yang berasal dari deretan gunung api yang terletak di sebelah selatan kawasan ini, mulai dari timur ke barat, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmoro dengan ketinggian antara 1600 m hingga sekitar 3250 m dari permukaan air laut.

Secara geologis, kawasan Trowulan dan sekitarnya tersusun dari endapan gunung api Kuartar Tua. Secara umum material ini berasal dari bahan piroklastika berukuran pasir, kerakal, dan di beberapa tempat terdapat tufa. Lapisan ini tentu saja dihasilkan dari aktivitas gunung-gunung api yang aktif di sebelah selatannya. Di utara kawasan ini terdapat sesar



Gambar 4. Keletakan Trowulan di antara deretan pegunungan yang melingkupi

memanjang barat – timur yang membentuk cekungan di antara Pegunungan Kendeng di utara dan deretan gunung api di selatan. Cekungan yang terbentuk menarik aliran air dari dataran tinggi di selatannya membentuk sungai-sungai radial dengan arah utara selatan. Sesampai di cekungan, aliran membelok menjadi arah barat – timur, seperti yang ditunjukkan oleh Sungai Brantas dan Kali Ngonto yang ada di utara kawasan Trowulan.

Kawasan Trowulan yang merupakan dataran dengan ketinggian antara 30 - 40 m dari permukaan laut, sebagian terbesar tanahnya terbentuk dari endapan fluvial dengan ukuran butir yang halus. Sumber bahan pembentuk tanah itu berasal dari gunung api di selatannya. Selain menyediakan lahan yang subur untuk tanaman, bahan batuan seperti itu menyediakan bahan yang sangat baik untuk pembuatan tanah liat bakar (terakota, gerabah, dan bata). Tidak mengherankan, jika ketersediaan bahan batuan ini ikut mendukung berkembangnya pembuatan gerabah dalam masyarakat Majapahit dan hingga kini berlanjut dengan pembuatan bata.

Kepadatan temuan di kawasan Trowulan, yang menyiratkan sebagai pusat kota Majapahit, ternyata terkait erat dengan bentang alamnya. Kawasan ini merupakan bagian yang memiliki pola aliran air terendah. Artinya, kawasan ini berupa bentang lahan datar yang cukup luas dengan sedikit aliran air atau jaringan sungai. Aliran yang semestinya mengalir di kawasan ini berbelok sedikit ke barat, karena di bagian selatan kawasan Trowulan terdapat material batuan yang relatif lebih keras. Aliran air tidak mampu melewati bagian ini tetapi memilih jalur di baratnya yang relatif lebih rendah dan bermaterial lebih lunak. Akibatnya, terbentuk beberapa sungai kecil, termasuk Kali Gunting di barat Trowulan. Karena bahan pembentuknya, di barat kali ini tanahnya sangat subur dan diduga merupakan “lambung padi” yang mendukung kehidupan masyarakat kota Majapahit.

Kipas fluvio vulkanik di selatan Trowulan meluas ke arah timur hingga ke lereng Gunung Penanggungan. Seperti halnya di sisi barat, di sisi timur pun kipas aluvial ini dialiri oleh sejumlah sungai kecil, di antaranya adalah Kali Brangkal yang berhulu di lereng Gunung Anjasmoro. Kali ini mengalir arah selatan – utara sehingga akhirnya bertemu dengan Kali Ngonto di sisi utara Kota Mojokerto.

Dengan demikian, kawasan padat tinggalan arkeologis di Trowulan dapat dikaitkan dengan letaknya yang berada di antara dua aliran (interfluv), yaitu Kali Gunting di sisi barat dan Kali Brangkal di sisi Timur. Di sisi utaranya, kawasan ini dibatasi oleh aliran Sungai Ngonto yang merupakan lanjutan Kali Gunting setelah masuk ke cekungan atau sesar yang melintang barat – timur.

Masalah yang sering muncul pada dataran ini pada kaki kipas fluvio vulkanik adalah drainase dan genangan air. Genangan akan meningkat jika cekungan di utara kawasan ini airnya naik atau banjir, sehingga aliran air dari selatan akan terhambat. Dalam konteks ini, kiranya keberadaan jaringan kanal dan beberapa waduk yang tersebar terutama di bagian selatan Trowulan dapat dijelaskan. Jaringan kanal ini berfungsi sebagai pengendali air yang ada di kawasan ini, terutama ketika musim-musim kurang hujan. Meskipun ketersediaan air tanah mungkin mencukupi, tetapi mengingat kawasan ini padat hunian, udara akan terlalu kering. Uap air dari kanal diharapkan dapat meningkatkan kelembaban.

(Catatan : disarikan dari Sutikno, 1993 dan Mundardjito, 1985)

B. SEJARAH SINGKAT KERAJAAN MAJAPAHIT

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293 M, sebagaimana diceritakan dalam prasasti Kudadu. Pada awalnya, Raden Wijaya dibantu orang-orang Madura membuka hutan Trik, di pinggiran Sungai Brantas. Wijaya sesungguhnya adalah anak menantu Raja Krtanagara, penguasa Kerajaan Singasari (1222 – 1292) yang terakhir. Kerajaan Singasari hancur akibat pemberontakan seorang bangsawan Jayakatwang dan serangan tentara Kubilai Khan dari Cina.

Setelah berhasil mendirikan Majapahit, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja dengan gelar Sri Krtarajasa Jayawardhana. Ia memerintah dengan didampingi dua istri utamanya, Tri Bhuwaneswari dan Gayatri. Keduanya adalah anak Raja Krtanagara. Dari perkawinan dengan Tri Bhuwaneswari, Sri Krtarajasa mempunyai seorang putra, yaitu Jayanagara, sedangkan dengan Gayatri ia mempunyai dua orang putri, yaitu Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Rajadewi Maharajasa. Pada masa pemerintahan Sri Krtarajasa, beberapa orang yang dulu membantu mengalahkan tentara Kubilai Khan, yaitu Wiraraja dan anaknya Ranggalawe melakukan pemberontakan, tetapi dapat dipadamkan dengan terbunuhnya Ranggalawe oleh Nambi (1295). Tahun 1301, terjadi lagi pertentangan di antara para pejabat Majapahit, sehingga Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung terbunuh.

Ketika Sri Krtarajasa mangkat pada tahun 1309, ia lalu digantikan oleh putranya Jayanagara. Selama pemerintahan Jayanagara, kerajaan Majapahit sering menghadapi pemberontakan dari beberapa pejabat yang tidak setuju dengan kebijakannya, antara lain Mandana (1314), Nambi (1316), Lasem dan Semi (1318), serta Kuti (1319). Kuti sempat menduduki ibukota Majapahit, dan raja Jayanagara terpaksa mengungsi ke Badander diiringi oleh pasukan bhayangkari di bawah pimpinan Gajahmada. Meskipun raja akhirnya dapat kembali ke kraton, tetapi beberapa tahun kemudian ia dibunuh oleh Tanca, tabib istana.

Seperinggal Jayanagara, tahta Majapahit diperintah oleh Tribhuwanatunggadewi, adiknya yang lahir dari lain ibu. Putri Sri Krtarajasa ini ditunjuk oleh ibunya Rajapatni (Gayatri) untuk menggantikannya sebagai pemegang hak naik tahta. Ia didampingi oleh Aria Tadah, sebagai patih Majapahit. Tahun 1334, setelah berhasil memimpin penaklukan Sadeng, Gajahmada ditunjuk sebagai Mahapatih menggantikan Aria Tadah yang sudah kurang sehat. Sejak itulah, karier Gajahmada semakin menanjak. Ketika ia dinobatkan sebagai Mahapatih Gajahmada mengikrarkan sumpahnya, yang dapat diartikan : *“Setelah seluruh Nusantara tunduk, saya baru akan berhenti; setelah menundukkan Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, saya akan berhenti”*. Inilah yang kemudian dikenal sebagai *Sumpah Palapa*. Politik Nusantara inilah yang kemudian menjadi cikal bakal konsep wawasan Nusantara, meskipun sesungguhnya politik semacam ini pernah pula digagas oleh Sri Krtanagara, raja Kerajaan Singasari yang terakhir

Tahun 1334 terjadi gempa bumi karena aktivitas Gunung Kelud. Pada tahun yang sama lahir Hayamwuruk, anak raja Tribhuwanatunggadewi dengan Krtawardhana. Ia segera diberi kedudukan di Kahuripan sebagai raja muda (*yuwaraja*). Tahun 1351, Hayamwuruk dinobatkan menjadi raja menggantikan ibunya dengan tetap bergelar Sri Rajasanagara, sebagaimana yang ia pakai di Kahuripan. Walaupun rintisan kejayaan Majapahit telah dimulai pada masa pemerintahan Tri Bhuwanatunggadewi, jaman emas Majapahit tercapai pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk dengan Mahapatihnya Gajahmada. Sebagaimana diungkapkan oleh Prapanca dalam naskah Nagarakrtagama, pengaruh Majapahit meliputi wilayah yang amat luas, bahkan melebihi wilayah NKRI sekarang. Struktur birokrasi pemerintahan pada masa itu juga dianggap amat baik, terutama dengan adanya lima pejabat utama Sang Panca ri Wilwatikta, yang menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan pemerintahan. Angkatan laut di bawah Nala juga amat dikenal kekuatannya.

Meskipun demikian, masa kejayaan ini pun tidak lepas dari pertentangan yang membawa banyak korban, di antaranya adalah Perang Bubat pada tahun 1357. Bagi beberapa ahli sejarah, peristiwa ini menyebabkan Gajahmada terpaksa mundur setelah 23 tahun menjabat sebagai Mahapatih. Meskipun politik penyatuan Nusantara terus dijalankan, tetapi tidak lagi seaktif masa Gajahmada. Selama tiga tahun, jabatan mahapatih dirangkap oleh raja sendiri.

Hayamwuruk menikah dengan saudara sepupunya, Paduka Sori. Dari perkawinan ini, mereka mendapatkan seorang putri Kusumawardhan, yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana. Dari seorang selir, Hayamwuruk juga mempunyai seorang putra yang kemudian dikenal sebagai Bhre Wirabhumi. Setelah Hayamwuruk wafat pada tahun 1389, keadaan kerajaan Majapahit mulai menurun. Pertentangan antara anggota keluarga mulai meningkat, di antaranya yang paling tajam adalah antara Wikramawardhana yang menggantikan Hayamwuruk menjadi raja Majapahit dengan Bhre Wirabhumi. Pertentangan ini mengakibatkan terjadinya perang Paregreg pada tahun 1401. Perang ini dicatat pula oleh seorang pejabat Cina yang diperintahkan untuk singgah di Majapahit bersamaan dengan ekspedisi Zheng-he. Disebutkan, saat itu terjadi perang antara Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat, dan banyak orang Cina yang menjadi korban. Dari sumber sejarah diketahui bahwa perang berakhir dengan kemenangan di pihak Wikramawardhana yang menjadi raja hingga tahun 1429.

Setelah perang Paregreg, keadaan Majapahit semakin tidak stabil. Perselisihan antara anggota keluarga banyak terjadi. Kekuasaan Majapahit diserahkan kepada Putri Suhita (1429 – 1447), putri Wikramawardhana. Raja berikutnya adalah Krtawijaya (1447 – 1451) penguasa Tumapel, lalu digantikan oleh saudaranya Rajasawardhana (1451 – 1453), penguasa Pamotan. Antara tahun 1453 – 1456, terjadi kekosongan pemerintahan. Ketika itu, tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi.

Tahun 1456, Bhre Wengker atau Bhra Hyang Purwawisesa diketahui menjadi penguasa Majapahit. Ia cukup lama bertahan hingga wafat pada tahun 1466 dan diganti oleh Bhre Pandan Salas Dyah Suraprabhawa. Dua tahun berikutnya, kota Majapahit dikuasai oleh Bhre Krtabhumi, sedangkan Bhre Pandan Salas mengungsi ke Tumapel dan kemudian di Daha. Dari sini, ia tetap memegang pemerintahan Majapahit. Tahun 1474, ia digantikan oleh anaknya Dyah Ranawijaya, yang mendeklarasikan dinasti baru Girindrawardhana. Ia menyerang Majapahit dan menghancurkan ibukota yang dikuasai Bhre Krtabhumi (1478). Tidak diketahui apakah yang dimaksud kota di sini adalah pusat kota kerajaan di Trowulan.

Upaya Dyah Ranawijaya menegakkan kembali kewibawaan kerajaan Majapahit rupanya tidak terlalu berhasil karena pertentangan keluarga yang makin meruncing. Sementara itu, di daerah pesisir utara para penguasa kota pelabuhan yang makin maju semakin kuat kedudukannya. Melihat kemunduran kekuatan Majapahit, mereka yang telah memeluk agama Islam lalu mencoba mengambil alih kekuasaan. Kerajaan Islam pertama di Jawa muncul tahun 1478, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Bhre Krtabhumi di Majapahit. Kekuasaan Islam semakin menguat dan akhirnya mampu menguasai daerah Majapahit.

Kapan kerajaan Majapahit runtuh tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, dari catatan pelancong Italia Antonio Pigafetta, diketahui Majapahit masih ada meskipun hanya disebut sebagai kota. Berita dari Dinasti Ming, masih menyebutkan keberadaan kerajaan ini hingga 1499. Sumber sejarah yang lain menyebutkan Kerajaan Timur atau Belambangan yang masih Hindu masih terus bertahan setidaknya sampai tahun 1585. Namun, kebenaran tentang hal itu belum dapat dipastikan.

C. SEKILAS AWAL PENELITIAN TINGGALAN MAJAPAHIT

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16, ingatan akan kebesaran kerajaan ini rupanya masih terus hadir, terutama di tengah masyarakat Bali dan Jawa. Mereka menganggap kerajaan ini sebagai leluhur para penguasa kerajaan-kerajaan yang tetap bertahan di kedua tempat itu hingga masa perjuangan melawan penjajah. Meskipun sesungguhnya di Pulau Jawa sendiri kesadaran kolektif masyarakat terhadap kerajaan ini sudah banyak memudar. Hal ini tersirat dari penulisan Babad Tanah Jawi yang menjadi salah satu sumber utama sejarah Jawa. Dalam naskah ini, penulisnya secara tidak tepat menyebutkan pendiri Kerajaan Majapahit sebagai Jaka Sengguruh dari Sunda ! Mungkin ini semata-mata kesalahan penulisnya, tetapi hal ini setidaknya mencerminkan orang Jawa pun sudah tidak ingat sepenuhnya sejarah kerajaan besar ini (Muljana, 1983). Ingatan



Gambar 5. Peta keletakan situs Trowulan yang dibuat oleh Wardenaar tahun 1815

akan Kerajaan Majapahit tetap “terpelihara” sebagai legenda-legenda di masyarakat, karena dipertahankan oleh kelompok elite tradisional untuk melegitimasi keberadaan mereka. Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Jawa Tengah pun tetap menjadikan kerajaan Majapahit sebagai legitimasi keberadaannya. Namun, bagi kebanyakan orang ingatan itu tidak lagi berarti banyak dalam kehidupan mereka, bahkan cenderung memudar. Situasi ini menjadi semakin nyata ketika banyak tinggalan Kerajaan Majapahit tidak lagi dihormati dan dirawat. Memang ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa kota Kerajaan Majapahit di Trowulan selalu dijaga oleh kelompok masyarakat tertentu (Hadimulyo, 2007). Dalam kenyataannya, ada banyak tinggalan-tinggalan Majapahit yang dialihfungsikan, dan lebih banyak lagi yang ditinggalkan begitu saja, termasuk bekas kota Kerajaan Majapahit di Trowulan. Bagi masyarakat setempat kini, tinggalan-tinggalan itu tidak lagi banyak berarti.

Boleh dikatakan, baru pada paruh kedua abad ke-19 bangsa Indonesia seakan diingatkan kembali akan keberadaan Kerajaan Majapahit yang pernah jaya di seantero Nusantara. Masuknya kembali Kerajaan Majapahit dalam sejarah kepulauan Indonesia lebih banyak karena jasa para peminat bidang purbakala bangsa Belanda. Beberapa peminat sejarah kuno, di antaranya adalah Wardenaar pada awal abad ke-19 mulai mencoba mengungkap kembali tinggalan-tinggalan budaya Majapahit dan memetakan secara rinci (lihat Raffles, 1830). Minat yang sama ditunjukkan oleh W.R. van Hoevell dan R.D.M Verbeek yang mendatangi dan merekam tinggalan Majapahit di Trowulan pada sekitar tahun 1880-

tak-bendawi ini dapat dianggap sebagai nilai-nilai penting (*significance*) dari suatu warisan budaya. Keterkaitan antara warisan budaya bendawi dan tak-bendawi sangat erat. Tanpa wujud bendawi, warisan budaya tak-bendawi akan sulit dipahami, dianggap mitos atau dongeng belaka karena tidak memiliki bukti nyata, dan tentunya akan mudah untuk dilupakan. Sebaliknya, warisan budaya bendawi tanpa diketahui nilai-nilai penting-nya tidak akan bermakna, karena tidak lebih dari sekedar barang-barang kuno yang tak berarti apa-apa.



Gambar 7. Lambang LEMHANAS yang menggunakan sesanti Kesetiaan tertinggi pada NKRI

Rasanya, tidak seorang pun yang pernah belajar sejarah Indonesia tidak mengetahui dan mengenal Kerajaan Majapahit. Bahkan, dapat dikatakan Kerajaan Majapahit telah menjadi model bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak hal yang dapat menjadi bukti hal ini. Luas wilayah Kerajaan Majapahit, sebagaimana disebut dalam *Negarakrtagama*, menjadi acuan bagi para tokoh pendiri NKRI untuk membayangkan besarnya wilayah NKRI yang semestinya. Konsep itu menjadi salah satu alasan bagi perjuangan memasukkan Papua Barat (disebut *Wanin* dalam *Negarakrtagama*) menjadi wilayah Indonesia, dan juga ketika mendaku Kalimantan Utara dan Singapura (masing-masing disebut *Burunai* dan *Tumasik*) sebagai bagian dari republik ini pada Masa Orde Lama. Selain itu, ungkapan "*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*" yang pernah tertulis dalam buku *Sutasoma* karya Pu Tantular diangkat kembali menjadi semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ungkapan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (berbeda-beda tetapi tetap satu) kini menjadi semboyan bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman budaya. Sementara itu, *Tan Hana Dharma Mangrwa* (tak ada bakti yang mendua) menjadi semboyan yang menunjukkan kesetiaan tunggal dari Lembaga Pertahanan Nasional terhadap NKRI. Lalu, tekad mahapatih Majapahit Gajahmada untuk mempersatukan Nusantara dalam bentuk "*Sumpah Palapa*", dijadikan nama satelit yang diluncurkan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan tekad yang sama di jaman modern. Nama satuan pasukan pengawal raja Bhayangkari dipakai sebagai nama Kepolisian Indonesia.

Keberagaman warisan budaya bendawi Majapahit juga telah diakui oleh banyak ahli sebagai bukti nyata tingginya pencapaian budaya Majapahit pada masanya, sehingga dapat menjadi kebanggaan bangsa ini. Beberapa unsur budaya tinggi itu antara lain sebagai

berikut.

- Teknologi pengelolaan air terbukti lewat dibuatnya jaringan kanal di pusat kota Majapahit di Trowulan, sistem assainering dan pipa-pipa air, Kolam Segaran, serta Candi Tikus yang dibangun sebagai petirnaan dengan jaringan air yang canggih
- Teknologi pembuatan gerabah Majapahit merupakan salah satu yang paling maju di masanya, dengan beragam bentuk dan hiasan, termasuk juga genteng sebagai komponen bangunan
- Tata permukiman di kota Majapahit sudah sangat baik dengan pengaturan drainase, pertamanan, dan rumah-rumah yang cocok dengan lingkungan. Bahkan, di Kecamatan Trowulan banyak terungkap sisa-sisa permukiman yang cukup padat. Sejumlah candi besar dibangun di banyak tempat dan semuanya menunjukkan seni bangun yang sudah berkembang pesat.
- Sistem perpajakan, perundangan-undangannya, maupun struktur birokrasi kerajaan sudah amat teratur dan mantap, sehingga mampu menjadi prasarana penunjang keberhasilan mereka berkembang menjadi kerajaan besar
- Karya Susastra Masa Majapahit juga diketahui sangat maju berkembang. Para Kawi atau pujangga menghasilkan sejumlah karya sastra atau *kakawin* yang amat terkenal di antaranya Sutasoma dan Arjunawijaya oleh Tantular, Nagarakrtagama oleh Prapanca, Lubdaka, Wrttasancaya, Bawanasekar oleh Tanakung, serta Kunjarakarna oleh Dusun. Bahkan, pada masa Majapahit muncul genre baru dalam susastra yang kemudian dikenal sebagai *kidung*.
- Temuan-temuan artefaktual di situs-situs Majapahit mencerminkan hubungan sosial yang sangat teratur serta bersifat multikultural. Berbagai bangsa singgah dan bahkan tinggal di permukiman-permukiman Majapahit, terutama di pantai Utara Jawa. Pada masa kejayaan Majapahit yang berlatarbelakang agama Hindu, Budha, dan agama para Resi, sudah ada komunitas beragama Islam yang hidup di lingkungan kerajaan. Semua unsur religi ini hidup secara bersama-sama dengan saling menghormati.
- Kemampuannya memadukan cara hidup agraris dengan bahari membuat Majapahit mampu mempengaruhi wilayah yang amat luas dan mendukung perekonomian negara dengan sangat baik. Kemampuan menyediakan hasil bumi dari hasil kehidupan agraris yang dipadukan dengan kemampuan berlayar jauh untuk berdagang telah membuat kerajaan ini terbesar di Asia Tenggara kala itu. Selain itu, temuan artefaktual Majapahit juga membuktikan bahwa di kerajaan ini berbagai jenis industri sudah berkembang pesat, di antaranya tanah liat bakar (gerabah dan terakota, logam, makanan, pakaian, dan juga kain batik)

Masih banyak lagi unsur budaya Majapahit yang sebenarnya dapat menjadi bukti kuat akan tingginya peradaban yang telah dicapai. Mempertimbangkan semua hal tersebut, tidak ada keraguan sama sekali bahwa warisan budaya Majapahit memang mempunyai nilai penting yang amat tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia. Warisan budaya Majapahit adalah warisan budaya NASIONAL.

E. WARISAN BUDAYA BENDAWI

Walaupun dalam pengertiannya yang luas, warisan budaya meliputi unsur *bendawi* maupun *tak-bendawi*, tetapi dalam kegiatan pelestarian perhatian lebih ditujukan pada unsur-unsur bendawi-nya. Undang-undang RI no. 5 Tahun 1992 yang melindungi warisan budaya juga mencerminkan hal itu. Hal ini terlihat dari istilah yang digunakan yaitu Benda Cagar Budaya. UU ini (menurut draf revisinya) menyebutkan yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya mencakup tinggalan budaya sebagai berikut.

- (a) **Semua benda buatan manusia**, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi yang dianggap penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
- (b) **Benda alam** yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
- (c) **Situs** : lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya
- (d) **Kawasan Cagar Budaya** : satuan ruang geografis yang memiliki sejumlah situs yang berdekatan serta memperlihatkan adanya keterkaitan.

Sebenarnya, pengertian Benda Cagar Budaya (BCB) dalam undang-undang ini tidak tepat sama (identik) dengan warisan budaya. Cakupan warisan budaya jauh lebih luas, BCB hanyalah sebagian warisan budaya yang ditetapkan atau berpotensi untuk ditetapkan dalam rangka perlindungannya (“cagar”) secara hukum.

Kecenderungan untuk memberikan batasan yang lebih bersifat bendawi pada warisan budaya memang sulit dihindari, karena unsur-unsur budaya bendawi itu yang menjadi bukti-bukti nyata dari budaya. Meskipun yang hendak diwariskan sebenarnya adalah nilai-nilai yang ada di balik unsur budaya bendawi, tetapi tanpa bukti bendawi pewarisan nilai-nilai itu akan terkendala. Apalagi, unsur warisan budaya yang paling mudah dikelola dan dilestarikan adalah budaya bendawi. Dalam konteks ini, warisan budaya seringkali juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu warisan budaya yang mudah dipindahkan (bergerak, *movable*) dan tidak mudah dipindahkan (tak bergerak, *immovable*)

Kalau kita memperhatikan pengertian-pengertian di atas, maka sebenarnya warisan budaya itu amat sangat beragam bentuk maupun jenisnya. Kadangkala, memang agak sulit untuk memberikan petunjuk praktis untuk mengenali atau mengidentifikasi warisan budaya itu. Diperlukan cukup banyak pengetahuan dan pengalaman untuk dapat mengenali beragam jenis warisan budaya yang ada. Namun, apabila ditinjau dari aspek keruangannya, maka warisan budaya dapat dibedakan menjadi : (a) warisan budaya



Gambar 8. Warisan budaya bergerak hasil temuan di Trowulan

bergerak (baik artefak maupun ekofak), (b) warisan budaya tak bergerak (fitur, struktur, bangunan), dan (c) kawasan cagar budaya.

Dalam rangka kebijakan pelestariannya, warisan budaya bendawi Majapahit dapat pula dimasukkan ke dalam tiga kelompok tersebut. Mengingat amat beragamnya jenis warisan budaya bendawi Majapahit, tentu tidak mungkin didaftar secara lengkap berbagai jenis yang ada. Karena ini, di bawah ini akan diberikan gambaran beberapa contoh tinggalan pada setiap jenisnya.

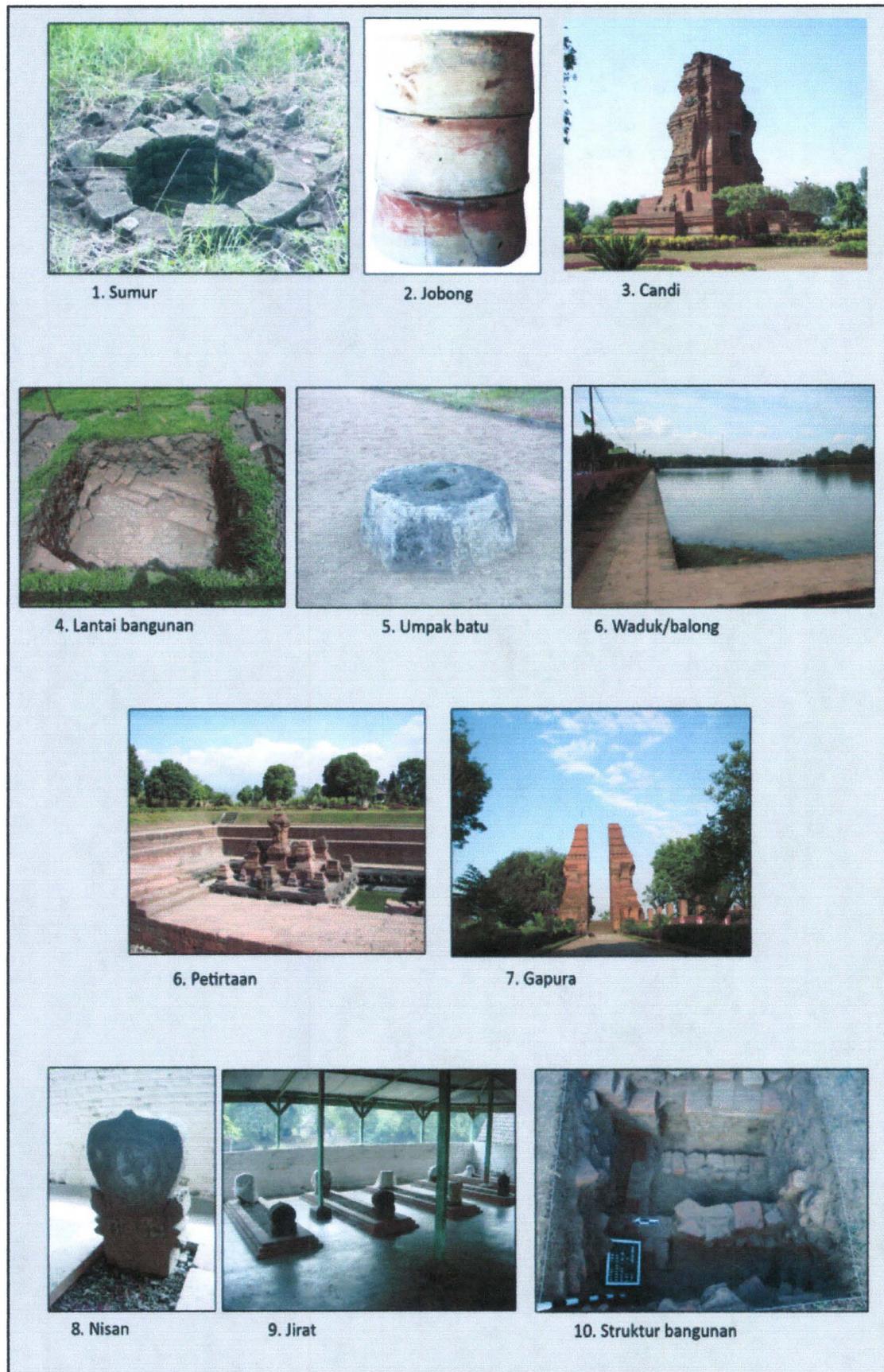
1	Bergerak	Beragam benda dari gerabah atau terakota (tabungan, wadah air, miniatur patung hewan, patung manusia, genteng, hiasan tiang), keramik asing, alat-alat logam, perhiasan, matauang, prasasti logam, prasasti batu, kowi atau pelebur logam, alat-alat rumah tangga, berbagai jenis senjata termasuk keris, bandul timbangan, arca ukuran kecil hingga sedang, tulang sisa makanan, tarak sisa peleburan, bekas tungku atau perapian, dan banyak benda lainnya.
2	Tak bergerak	Candi, sumur, jobong (selubung dinding sumur dari terakota), lantai bangunan, umpak batu, kanal, petirtaan, gapura, struktur (sisa-sisa bangunan, termasuk pondasi), bekas tiang, waduk atau balong, nisan dan jirat
3	Kawasan	Kumpulan atau sebaran situs (tempat atau lokasi yang mengandung temuan warisan budaya tak bergerak) yang mengelompok pada bentang lahan tertentu dan batasnya dapat ditentukan secara arbitrer.

F. NILAI PENTING

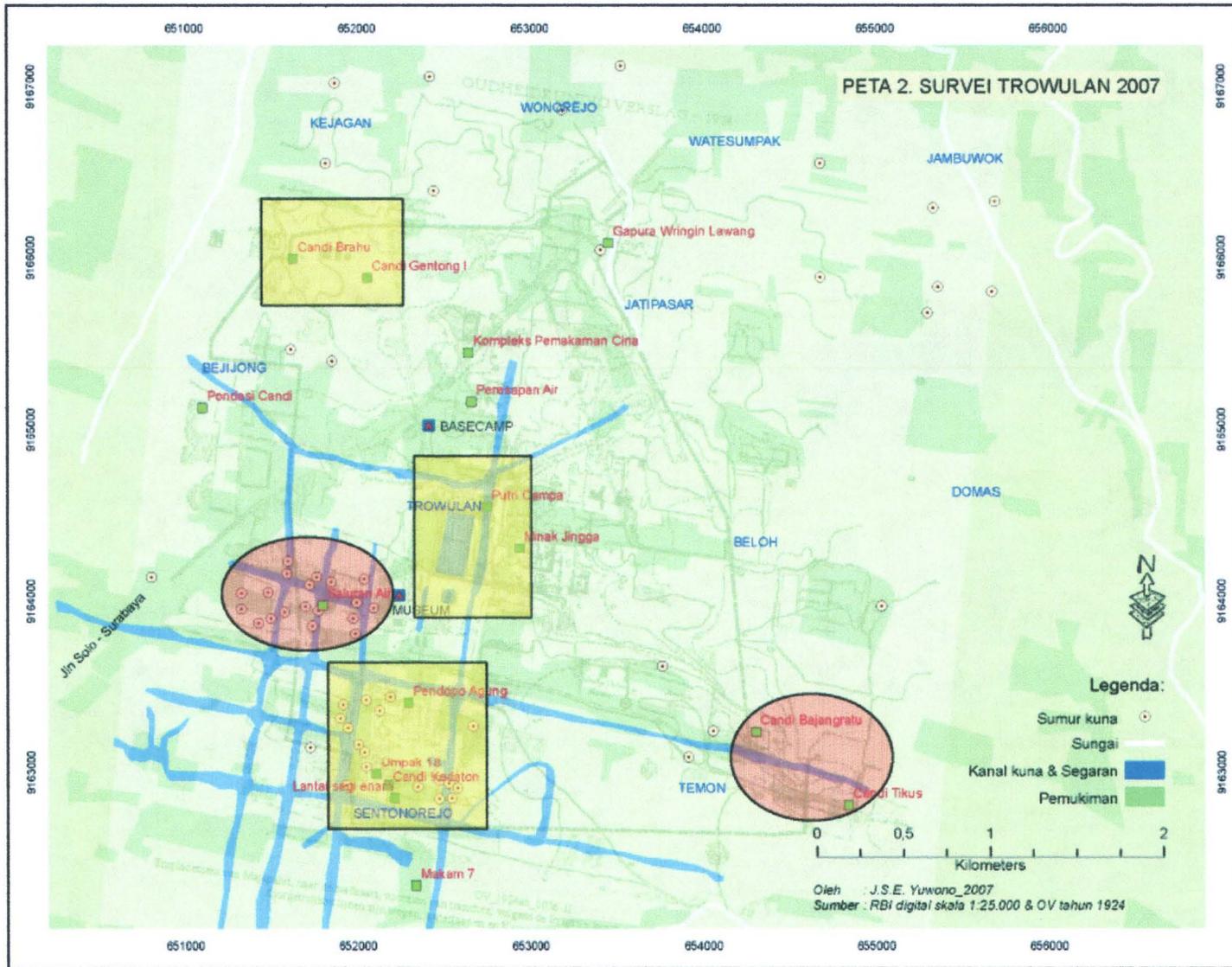
Konsep Nilai Penting dan Tolok Ukur

Setelah mengenali berbagai jenis warisan budaya, akan muncul pertanyaan tentang alasan mengapa kita perlu melestarikan warisan budaya kita. Jawaban yang paling sering dikemukakan adalah karena warisan budaya itu mengandung nilai-nilai yang penting. Namun, tidak mudah untuk menentukan dan mengenali nilai-nilai penting apa saja yang terkandung pada suatu warisan budaya, sehingga kita perlu berupaya keras untuk melestarikannya.

Ada banyak pandangan tentang nilai penting suatu warisan budaya. Kriteria nilai penting dapat didasarkan pada dua aspek, yaitu untuk kepentingan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan (Fowler, 1982). Pakar lain merumuskan lebih rinci, seperti yang dilakukan oleh Schiffer dan Gummerman (1977) yang melihat nilai penting dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sejarah, etnis, publik, dan pendanaan. Menurut UU no. 5 Tahun 1992 tentang BCB, nilai penting warisan budaya dapat dilihat dari kegunaannya bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Sayang sekali hingga kini, pengertian ketiga nilai penting dalam UU BCB itu belum diuraikan secara lebih jelas dan belum ada pedoman baku tatacara menentukan nilai penting itu.



Gambar 9. Warisan budaya tak bergerak hasil temuan di Trowulan



Gambar 10. Peta Kawasan Sebaran Temuan Situs Trowulan

Untuk menentukan nilai penting warisan budaya Majapahit dapat digunakan kriteria yang ada dalam UU RI no. 5 Tahun 1992 dengan penjabaran yang lebih rinci berdasar beberapa pandangan lain. Gabungan antara kriteria nilai penting UU RI no. 5 Tahun 1992 dengan sejumlah pendapat tersebut dapat dirisalahkan sebagai berikut (Tanudirjo, 2004).

<p>1. Nilai penting Sejarah : apabila sumberdaya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu Termasuk di dalamnya : (a) berkaitan erat dengan peristiwa (event) penting yang terjadi pada masa prasejarah maupun sejarah; (b) berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah atau merupakaninggalan/karya tokoh terkemuka (master) dalam bidang tertentu; (c) Berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mewakili salah satu tahapan penting tersebut, a.l. penemuan baru, munculnya ragam (style) baru, penerapan teknologi baru; (d) Berkaitan erat dengan tahap perkembangan suatu kehidupan tertentu atauinggalan yang mewakili salah satu tahapan tersebut (misalnya, pasang-surut kehidupan ekonomi, sosial, politik)</p>
<p>2. Nilai penting Ilmu Pengetahuan : apabila sumberdaya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu, termasuk Arkeologi, Antropologi, Ilmu Sosial, Hukum, Arsitektur dan Teknik Sipil, Ilmu Kebumihan, dan Ilmu-ilmu lain</p>
<p>3. Nilai penting Kebudayaan : apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (cultural identity) bangsa atau komunitas tertentu. Termasuk di dalamnya (a) Etnik, dapat memberikan pemahaman latarbelakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu, merupakan bagian dari jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu ; (b) Estetik, mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk juga keserasian antara bentang alam dan karya budaya (sajana budaya); menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan mendatang; (c) Publik, berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya, menyadarkan tentang keberadaan manusia sekarang; berpotensi atau telah menjadi fasilitas rekreasi; dan berpotensi atau telah menjadi sumberdaya yang dapat menambah penghasilan masyarakat, a.l lewat kepariwisataan; (d) Politis, ketika warisan budaya dipakai sebagai legitimasi politis kelompok atau negara tertentu.</p>

Pernyataan Nilai Penting (Statement of Significance)

Nilai Penting Sejarah

1. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan kuno yang mempunyai makna sangat penting bagi **sejarah nasional** Indonesia. Warisan budaya Majapahit, baik bendawi maupun takbendawi, merupakan bukti-bukti yang

amat bernilai bagi sejarah keberadaan kerajaan ini. Karena itu, warisan budaya Majapahit mempunyai nilai penting tinggi bagi sejarah Indonesia pada tataran nasional.

2. Kawasan Trowulan mengandung tinggalan budaya Majapahit yang sangat padat dan dapat ditafsirkan sebagai pusat kota Majapahit. Sejauh ini, situs perkotaan Majapahit di Trowulan merupakan situs perkotaan tertua dan satu-satunya yang bercorak Hindu-Budha yang pernah ditemukan di Indonesia. Karena itu, situs perkotaan Majapahit ini mempunyai nilai penting amat tinggi dalam sejarah perkembangan perkotaan di Indonesia.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

3. Warisan Budaya Majapahit yang bersifat tak-bendawi maupun bendawi telah terbukti menjadi bahan kajian yang penting bagi ilmu pengetahuan berbagai bidang di antaranya arkeologi, antropologi, lingkungan, arsitektur, geografi, geologi, perkotaan, hukum, dan sastra. Karena itu, warisan budaya Majapahit **memiliki nilai penting yang tinggi untuk kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan.**

Nilai Penting Kebudayaan

4. Warisan budaya Majapahit telah terbukti menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, bahkan menjadi model dalam beberapa aspek kenegaraan NKRI, baik dalam segi struktur birokrasi, lambang-lambang negara, konsep keberagaman budaya (multikulturalisme), maupun hukum. Karena itu, warisan budaya Majapahit merupakan bagian dari **jatidiri bangsa Indonesia** dan juga memiliki **nilai penting politik yang tinggi.**
5. Warisan budaya Majapahit memiliki unsur budaya unggul yang terbukti lewat tinggalan-tinggalan bendawinya, di antaranya seni bangun (tatakota, irigasi, arsitektur), seni kriya (a.l. gerabah, logam, kain), seni sastra (kakawin dan kidung), dan seni dekorasi (pola hias gerabah, hiasan rumah). Keunggulan budaya ini hampir tidak ada bandingan di antara temuan lain di Indonesia yang sejaman dan kini telah terbukti menjadi sumber ilham (inspirasi) bagi karya budaya di masa kini. Karena itu, tinggalan Majapahit **memiliki nilai penting tinggi dari segi estetika.**
6. Tinggalan-tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai **sarana pendidikan masyarakat** tentang hal-hal yang terkait dengan adaptasi masyarakat di lingkungan kipas fluvial vulkanik yang

sering menghadapi banjir dan limpasan lahar, serta keberhasilan strategi yang memadukan budaya bahari dan agraris.

7. Tinggalan Majapahit di Trowulan mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata (sejarah) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka tinggalan-tinggalan budaya Majapahit yang terdapat di kawasan Trowulan memiliki nilai penting yang amat tinggi bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan setidaknya pada tataran nasional.

Karena itu, tanggungjawab pengelolaan dan pelestarian warisan budaya Majapahit di kawasan Trowulan harus berada pada otoritas pada tataran nasional.

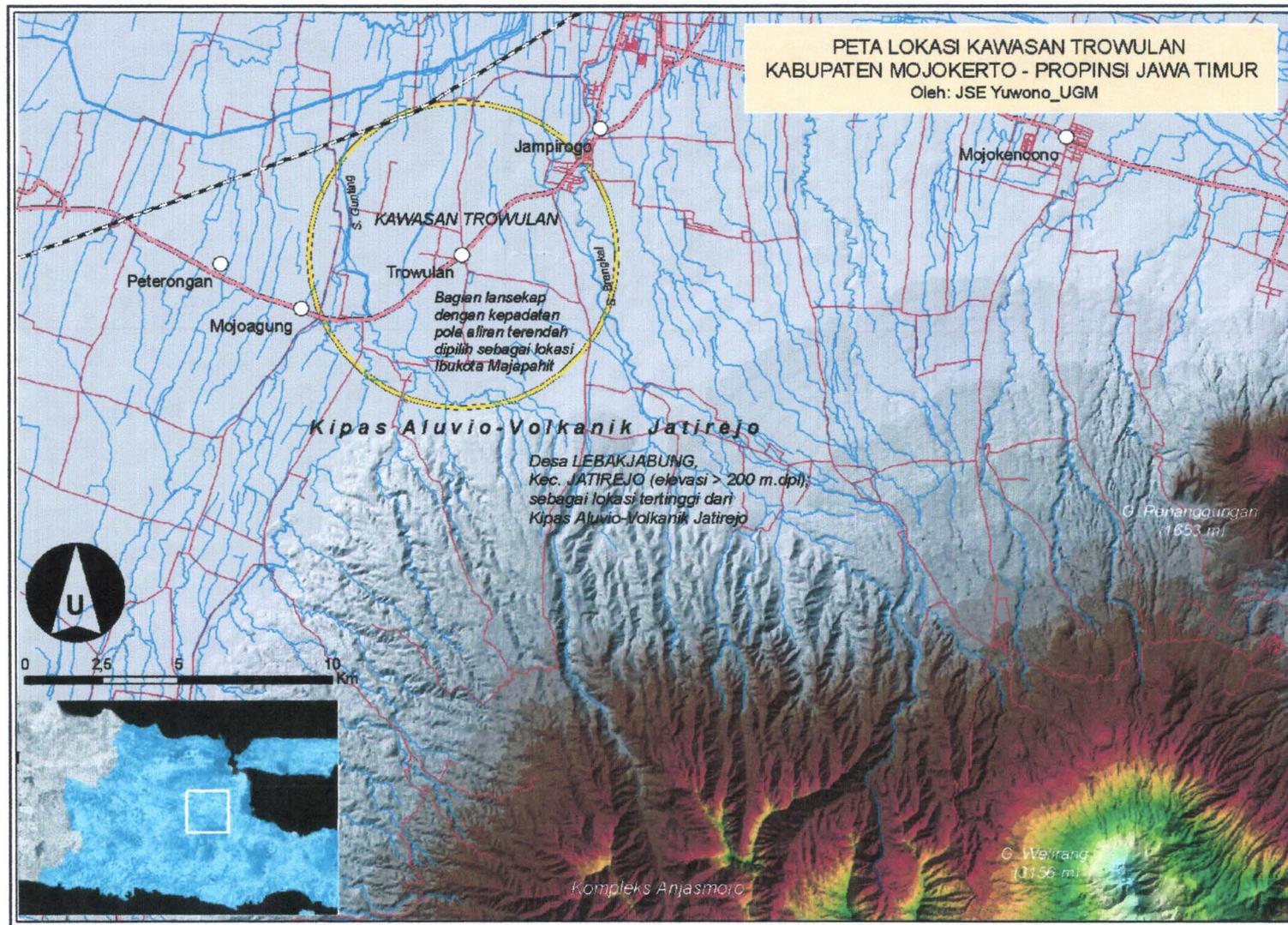
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

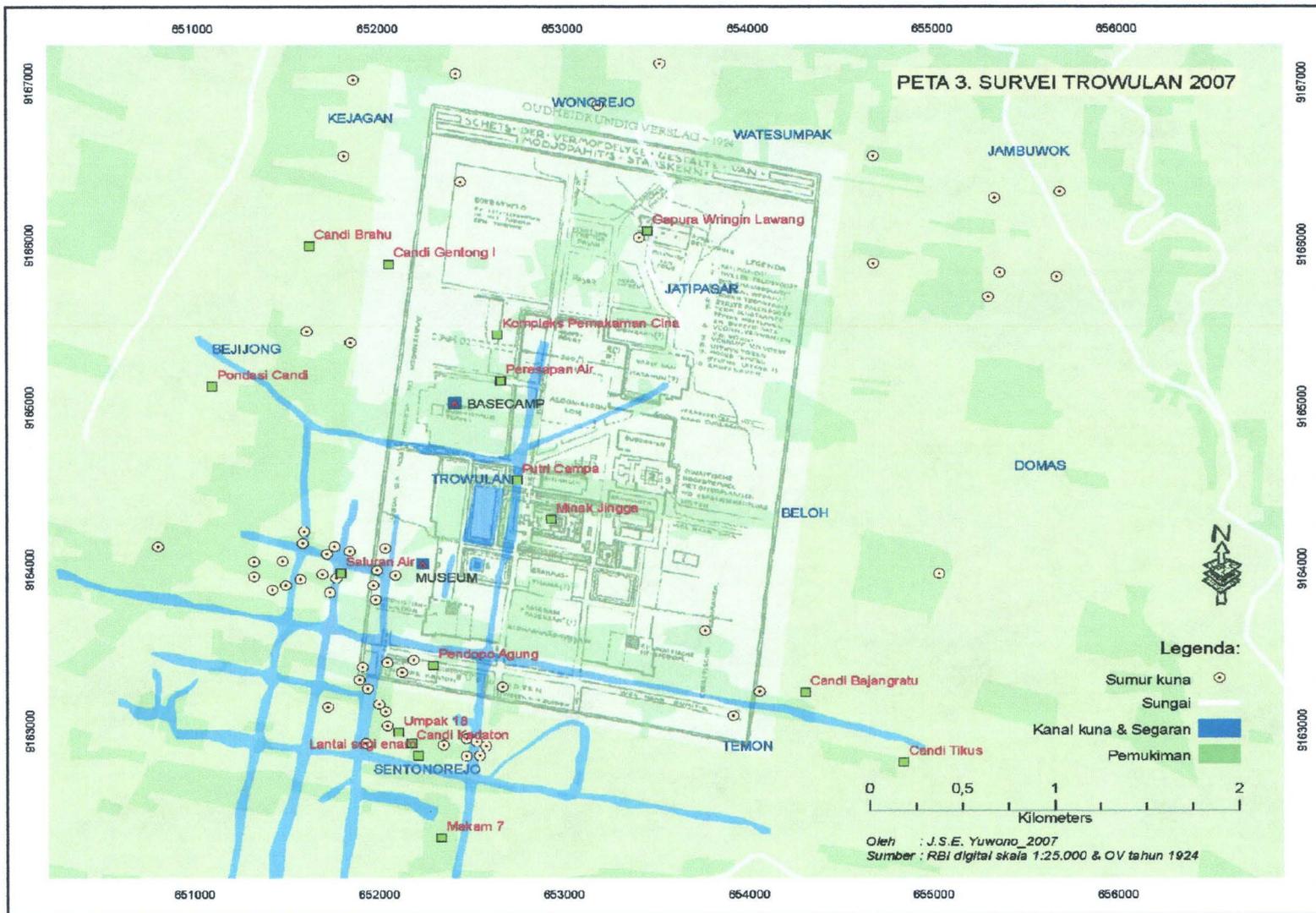
Warisan budaya bendawi Majapahit yang terdapat di Kawasan Trowulan memiliki nilai penting yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia sebagai pewarisnya untuk berupaya melestarikannya. Namun, kegiatan pelestarian bukan merupakan hal yang mudah. Berbagai masalah harus terlebih dahulu diidentifikasi agar dapat dirancang konsep pelestarian yang sesuai. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya beberapa isu strategis yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pelestarian. Isu-isu strategis ini meliputi dua hal utama, yaitu hal-hal yang terkait dengan keberadaan warisan budaya bendawi Majapahit dan masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang diperkirakan akan menjadi tantangan atau hambatan untuk melakukan upaya pelestarian. Dengan mengidentifikasi kedua hal utama tersebut diharapkan konsep pelestarian dapat disusun sebagai bagian dari pemecahan (mitigasi) berbagai masalah yang terungkap.

A. MASALAH LINGKUP KERUANGAN

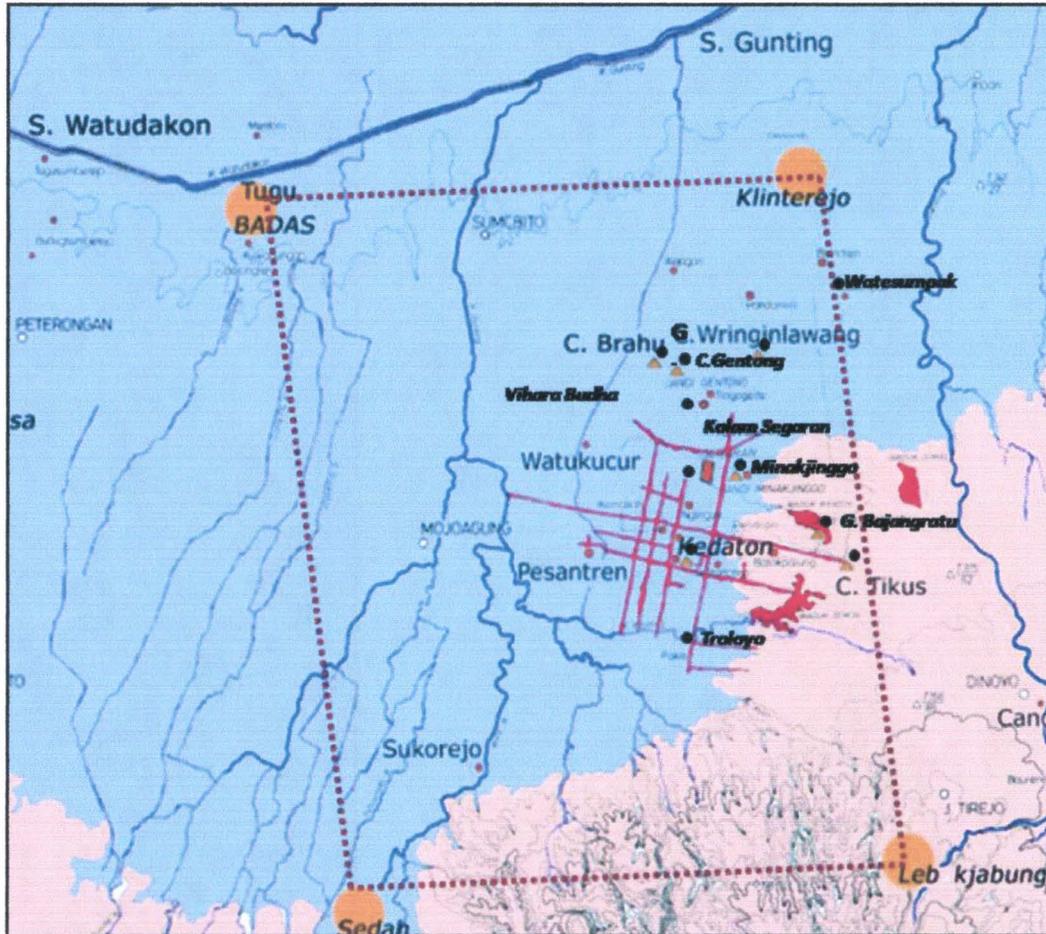
Majapahit adalah kerajaan besar yang wilayah kekuasaan maupun pengaruhnya amat luas. Karena itu, warisan budaya Kerajaan Majapahit tentunya tersebar amat luas sesuai dengan keluasan wilayah dan pengaruhnya. Dalam rangka penyusunan konsep pelestarian, tentu akan muncul pertanyaan tentang lingkup keruangan pelestarian yang akan direncanakan. Sejauh mana cakupan ruang yang layak untuk dilestarikan sehingga dapat benar-benar mewakili entitas yang disebut dengan Kerajaan Majapahit ?



Gambar 11. Peta Lokasi Kawasan Trowulan



Gambar 12. Kota Majapahit hasil rekonstruksi MacLaine Pont 1924 ditampilkan pada peta Survei 2007



Gambar 13. Rekonstruksi Batas Kota Majapahit berdasarkan temuan sisa lingga patok atau tugu batas

Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Meskipun dalam konteks ini, sesungguhnya telah disepakati bahwa yang hendak dilestarikan pada tahap ini adalah kawasan yang selama ini dianggap sebagai pusat kota Majapahit di Trowulan, tetapi menentukan batas-batas kawasan itu tidaklah mudah. Seperti diketahui, ada banyak pendapat ahli tentang keberadaan dan luasan kota Majapahit itu. Perdebatan ini memang telah lama berlangsung dan hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai.

Sejak tahun 1920-an, Maclaine Pont telah mencoba merekonstruksi kota Majapahit dengan menggabungkan tafsiran terhadap gambaran kota Majapahit sebagaimana diuraikan oleh Prapanca dalam *Nagarakrtagama* dengan kondisi yang ada di lapangan. Ia memang berhasil memberikan gambaran keberadaan kota ini, tetapi tidak semua ahli setuju dengan hasil rekonstruksinya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada juga beberapa penafsiran baru tentang kota Majapahit ini. Berdasarkan hasil penelitian untuk merunut batas-batas kota Majapahit (Rangkuti, 2002), diperkirakan batas kota Majapahit ditandai oleh empat tinggalan Majapahit, yang posisinya membentuk empat persegi panjang (tepatnya : jajaran genjang) mengelilingi kawasan Trowulan. Keempat tinggalan tersebut adalah Yoni Lebak Jabung

termasuk Makam Putri Campa dan Minakjinggo di timur lautnya. Dengan demikian, dugaan ini sekaligus menjelaskan mengapa Kolam Segaran dan beberapa tinggalan lain di sekitarnya tidak disebutkan oleh Prapanca dalam Nagarakrtagama.

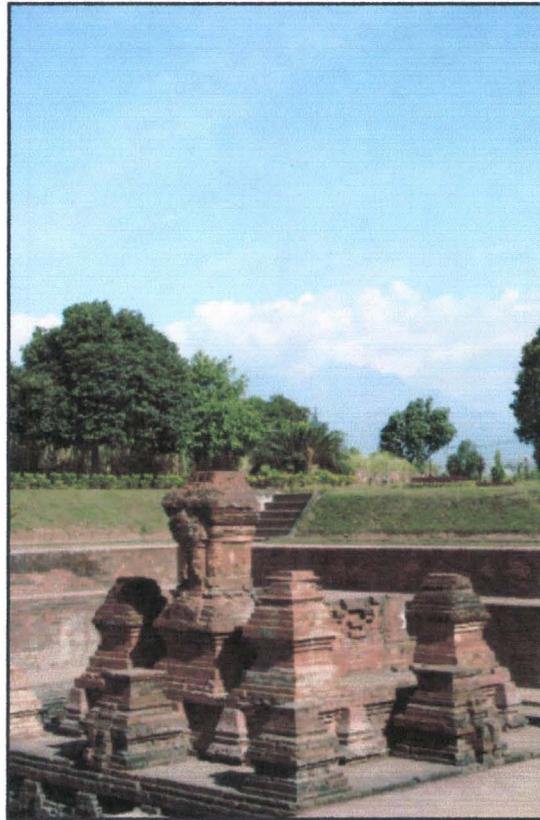
Dengan adanya berbagai versi rekonstruksi tersebut, maka lingkup keruangan kawasan yang akan dilestarikan menjadi salah satu isu strategis dalam menyusun konsep kebijakan pelestarian. Batas-batas kawasan harus ditentukan dan tentunya juga penamaan kawasan tersebut. Nama kawasan perlu ditetapkan karena akan memberikan citra atau gambaran, apa yang hendak dilestarikan dalam perencanaan ini.

B. KERAGAMAN WARISAN BUDAYA

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan tinggalan-tinggalan budaya Majapahit. Dari paparan tersebut, tampak bahwa warisan budaya bendawi Majapahit ternyata amat beragam, baik dari segi bentuk, bahan, jenis, fungsi maupun lokasinya. Keragaman ini tentu menjadikan persoalan sendiri dalam proses pelestariannya. Dalam penyusunan konsep kebijakan pelestarian, tentu semua variabel tersebut harus diperhitungkan. Karena itu, aspek keragaman warisan budaya Majapahit menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhitungkan dalam konsep kebijakan pelestarian dan pengembangan tinggalan Majapahit di Trowulan.

Masalah keragaman warisan budaya bendawi ini juga terkait dengan konsep tentang pelestarian konteks lingkungan tempat warisan budaya itu berada, baik lingkungan alam maupun sosial budaya. Dalam kaitannya dengan lingkungan fisik, di masa kini seringkali dipersoalan masalah latar keruangan dari tinggalan tersebut. Salah satu prinsip mempertahankan keaslian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan PP 10 tahun 1993, pasal 26 ayat 2, yang dimaksudkan dengan keaslian termasuk adalah tataletaknya. Selain itu, dalam konvensi internasional, ada ketentuan yang sama bahwa keaslian suatu warisan budaya meliputi aspek-aspek : (a) bentuk dan desain, (b) material dan zat, (c) kegunaan dan fungsi, (d) tradisi, teknik dan sistem manajemen, (e) lokasi dan latar/setting, (f) bahasa, dan bentuk lain warisan tak-bendawi, (g) semangat dan perasaan dan (h) faktor internal dan eksternal lainnya. Hal-hal itu tentu harus ikut dipertimbangkan dalam penyusunan konsep kebijakan pelestarian karena akan menjadi penting dalam penentuan mintakat pelestariannya.

Masih terkait dengan aspek ini, saat ini semakin kuat munculnya gerakan untuk tidak sekedar melestarikan monumen, tetapi juga lingkungannya. Gerakan ini antara lain juga memunculkan konsep lanskap budaya (*cultural landscape*). Dalam konsep ini, pelestarian harus dilakukan sebagai kesatuan antara tinggalan yang ada dengan lingkungan alamnya. Lanskap budaya adalah bentang alam yang merupakan paduan hasil karya manusia dan alam, yang menunjukkan evolusi masyarakat manusia dan permukiman sepanjang waktu di bawah pengaruh keterbatasan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan alam dan oleh kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya baik dari luar maupun dalam budaya itu sendiri. Lanskap budaya dapat terdiri atas (a) lanskap budaya yang dirancang dan diciptakan



Gambar 15. Lanskap budaya mengkaitkan monumen dengan lingkungan

oleh manusia, (b) lanskap budaya yang berevolusi secara organik, dan (d) lanskap budaya asosiatif yang menunjukkan keterkaitan dengan kepercayaan, seni, maupun antara budaya dengan masyarakat.

Isu strategis ini akan memunculkan pertanyaan : apakah lanskap budaya Majapahit akan menjadi bagian yang dilestarikan ? Sejauh apa lanskap budaya Majapahit akan dilestarikan ? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya akan turut mewarnai kebijakan yang akan diambil dalam pelestarian kawasan Trowulan. Demikian pula, luasan kawasan yang akan dimasukkan.

C. KEPEMILIKAN LAHAN

Hampir di semua tempat, salah satu isu penting dalam pelestarian warisan budaya adalah masalah kepemilikan lahan. Isu ini menjadi semakin kuat ketika wilayah yang akan dilestarikan amat luas dan berada di daerah yang berpenduduk cukup padat, seperti yang terdapat di daerah Trowulan dan sekitarnya. Hampir seluruh wilayah ini, lahan yang ada dimiliki oleh masyarakat setempat. Di situlah mereka bermukim dan mengolah lahan untuk mencukupi kebutuhannya. Tanah merupakan modal utama masyarakat Trowulan

yang mengandalkan kehidupan dari sektor pertanian dan industri bata. Mati hidup mereka tergantung hasil yang dapat diperoleh dari lahan mereka.

Masalah kepemilikan lahan menjadi rawan ketika di dalamnya terkandung warisan budaya bendawi Majapahit yang mempunyai nilai penting tinggi. Padahal, hampir dapat dipastikan setiap jengkal tanah di kawasan Trowulan mengandung tinggalan, meskipun dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Apabila temuan yang ada berupa warisan budaya bendawi bergerak, masalah ini tidak terlalu pelik. Namun, masalahnya menjadi sulit apabila yang ditemukan adalah warisan budaya bendawi takbergerak, apalagi jika temuannya cukup luas. Tindakan apa yang dapat dilakukan agar tinggalan yang ada di lahan tersebut dapat diselamatkan? Apakah setiap kali ada temuan (karena lahan itu digarap oleh masyarakat), pemerintah harus membebaskan tanah?

Persoalannya bukan hanya pada kemampuan pemerintah untuk membeli lahan-lahan tersebut, tetapi juga nasib pemilik tanah setelah lahannya dibeli pemerintah. Hampir dipastikan bahwa pemerintah tidak mungkin akan membebaskan seluruh kawasan padat tinggalan Majapahit dengan membelinya. Dibutuhkan dana yang amat besar untuk itu. Selain itu, apa yang harus dilakukan oleh pemilik ketika mereka tidak lagi memiliki lahan untuk menunjang kebutuhan hidupnya? Apakah seluruh penduduk kawasan itu harus dipindahkan?

Karena itu, isu strategis kepemilikan lahan ini menjadi salah satu unsur yang amat perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan konsep kebijakan pelestarian. Perlu dicari dan dirumuskan mekanisme atau cara yang memungkinkan menyelesaikan masalah pelik ini yang menguntungkan semua pihak.

D. MATAPENCAHARIAN PENDUDUK

Sebagian terbesar penduduk kawasan Trowulan adalah petani dan pembuat bata. Ironinya, justru kedua matapencaharian yang saling terkait ini merupakan kegiatan yang sangat potensial merusak dan menghilangkan warisan budaya bendawi yang terkandung di dalam tanah. Karena itulah, matapencaharian penduduk berdampak langsung terhadap keberadaan tinggalan bendawi Majapahit di Kawasan Trowulan.

Para petani menggarap tanah mereka sebagai lahan pertanian bersifat musiman, di antaranya ditanami padi, tebu, dan palawija. Semua kegiatan pertanian itu tentu harus dilakukan dengan mengolah tanah yang cukup dalam. Untuk tetap memperoleh hara tanah yang baik, para petani perlu mencangkul tanah setidaknya dengan kedalaman 30 cm. Padahal, pada kondisi yang sekarang, benda-benda tinggalan Majapahit sudah akan dapat ditemukan pada kedalaman tersebut. Selain itu, para petani memerlukan jaringan irigasi yang cukup, terutama untuk sawah mereka. Kebutuhan irigasi juga mendorong dibangunnya prasarana-prasarana irigasi yang tentunya amat berpotensi menimbulkan kerusakan pada tinggalan-tinggalan yang memang padat ditemukan di kawasan itu. Bahkan, kebutuhan akan perluasan tanah pertanian sawah telah berakibat beberapa jejak kanal mengalami kerusakan. Kanal yang pada awalnya hanya memiliki lebar sekitar 20 m, kini menjadi semakin lebar karena dinding aslinya dipangkas untuk meluaskan lahan pertanian. Hal ini dapat dimengerti karena jejak-jejak kanal tersebut pada umumnya merupakan lahan



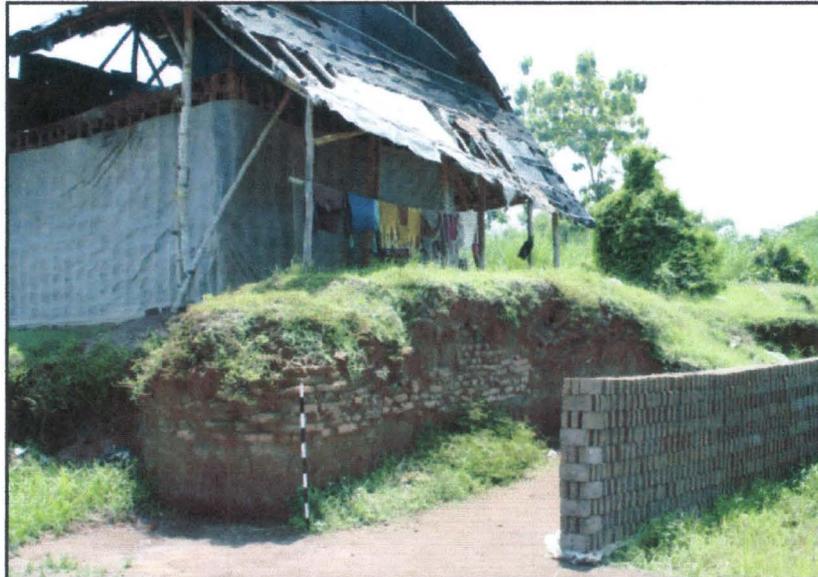
Gambar 16. Kegiatan pertanian yang dapat memberi dampak negatif terhadap kelestarianinggalan.

yang lebih subur dibanding bagian lain yang banyak mengandung fitur (struktur bata). Dengan demikian, kegiatan pertanian jelas memberi dampak negatif terhadap kelestarianinggalan-tinggalan Majapahit tersebut.

Dampak negatif yang lebih besar ditimbulkan oleh kegiatan pembuatan bata, karena penggalian untuk memperoleh bahan bata dilakukan hingga kedalaman 1,5 meter atau bahkan lebih. Memang sejak dahulu produksi bata di Kawasan Trowulan sudah dikenal cukup baik. Tanah fluvio-vulkanik yang terdapat di kawasan yang berada di kipas aluvial ini memang cocok untuk pembuatan bata dengan kualitas yang baik. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, kebutuhan akan bata yang baik semakin meningkat, karena itu permintaan terhadap bata produksi kawasan Trowulan juga semakin meningkat dengan pesat. Tempat-tempat pembuatan bata juga bertambah dengan sangat signifikan. Hingga kini di kawasan Trowulan saja, terdapat tidak kurang dari 3000 tempat pembuatan bata, yang oleh masyarakat dikenal sebagai *linggan*. Tiap hari ratusan ribu bata dihasilkan dan dijual ke berbagai tempat di luar Trowulan, terutama kota-kota besar di sekitarnya. Karena kebutuhan tersebut, setiap hari ratusan kubik (m³) tanah di Kawasan Trowulan digali. Banyak sekali fitur atau struktur batainggalan Majapahit yang terpangkas dan dikorbankan untuk dapat memperoleh bahan bata. Ribuan artefak bergerak tergali dan rusak karena pengolahan tanah untuk bahan bata setiap harinya. Penggalian tanah bahkan semakin mendekati pada lingkungan bangunan candi

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan maraknya pembuatan bata. Pertama, permintaan pasar akan bata memang tinggi. Kedua, penghasilan yang diperoleh dari pembuatan bata lebih tinggi dibandingkan pertanian. Ketiga, pembuatan bata membantu petani menemukan lahan yang lebih subur. Penyebab ketiga ini kiranya perlu penjelasan sedikit. Pada umumnya, para petani menyadari bahwa keberadaan benda-bendainggalan Majapahit yang ada di dalam tanah mereka mengakibatkan tanah mereka kurang subur,

sehingga produktivitasnya cenderung kecil. Di sisi lain, mereka juga tahu bahwa di bawah tanah yang mengandung tinggalan, terdapat tanah yang asli yang lebih subur. Karena itu, para petani menyewakan lahan mereka untuk pembuatan bata dengan pertimbangan akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu (a) mendapat uang sewa lahan dan (b) pada akhir masa sewa, lahan mereka telah bersih dari tinggalan Majapahit dan berada pada lapisan tanah asli yang lebih subur. Selanjutnya, di tanah yang lebih subur mereka akan dapat bertani lebih produktif.



Gambar 17. Di bawah linggan tampak struktur yang terkupas akibat pembuatan bata

Pembuatan bata juga mengakibatkan dampak kurang menguntungkan terhadap perawatan bangunan tinggalan Majapahit yang sudah ada. Kini, banyak pembuat bata yang menggunakan bahan-bahan bakar yang tidak konvensional, di antaranya karet ban, plastik, dan sisa karet sandal. Asap dan zat-zat kimiawi yang dihasilkan pembakaran tentu menyebabkan polusi. Tidak hanya tidak sehat bagi manusia, tetapi juga mencemari udara yang secara langsung akan mempengaruhi kondisi tinggalan Majapahit yang ada. Meskipun hingga saat ini belum ada penelitian yang rinci tentang dampak yang ditimbulkan, dapat dipastikan dalam jangka panjang polusi ini berdampak negatif bagi pelestarian tinggalan Majapahit.

Pencarian Artefak

Meskipun secara terselubung, sebagian penduduk kawasan Trowulan juga secara sengaja mencari tinggalan-tinggalan Majapahit, terutama berupa warisan budaya bendawi bergerak. Harus diakui, nilai jual benda-benda ini cukup tinggi dan memang ada permintaan dari luar Trowulan akan benda-benda yang dianggap “barang antik” ini. Tentu saja, kegiatan ini berpotensi untuk menghilangkan warisan budaya bergerak dari kawasan Trowulan, terutama justru benda-benda yang langka dan bernilai tinggi.



Gambar 18. Berbagai artefak tinggalan Majapahit yang merupakan temuan dari penduduk sekitar

E. TEKAMAN PEMBANGUNAN

Tidak dapat disangkal, gerak roda pembangunan yang berputar semakin cepat ikut memberikan ancaman terhadap kelestarian warisan budaya Majapahit, tidak saja yang berupa warisan budaya bendawi tetapi juga yang tak-bendawi. Pembangunan yang rupanya masih berkiblat pada pencarian dan pencapaian akan hal-hal lebih bersifat materialistis, seringkali melunturkan kebutuhan akan nilai-nilai budaya yang sebenarnya dapat memperkaya hidup manusia.

Kebutuhan akan pembangunan yang semakin meningkat terjadi hampir di semua tempat di Indonesia, karena tuntutan akan kehidupan yang lebih baik. Tentu hal itu tidak mungkin dicegah atau dihentikan begitu saja demi kelestarian warisan budaya. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengarahkan gerak pembangunan untuk mencapai kebutuhan akan hal-hal bersifat material dengan tetap menghargai nilai-nilai ekonomi dan budaya yang dapat diperoleh dari tinggalan-tinggalan yang ada.

Dalam konteks pembangunan regional Jawa Timur, Kawasan Trowulan yang termasuk Kabupaten Mojokerto dianggap merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis. Karena itu, kawasan ini termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan yang dinamai Gerbang Kertosusila. Satuan wilayah ini dianggap sebagai pintu masuk (gerbang) ke Jawa Timur, yang terdiri dari wilayah Mojokerto (*kerto*), Surabaya (*su*), Sidoarjo (*si*), dan Lamongan (*la*). Sebagai bagian dari pintu masuk ke Jawa Timur, tentu saja Kecamatan Trowulan yang padat tinggalan Majapahit menempati posisi yang penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Menurut Arah dan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang. Kabupaten Mojokerto lebih menekankan pada sektor industri. Kebijakan pembangunan yang akan diterapkan adalah penetapan wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai zona pembangunan industri di Jawa Timur, dengan tetap mempertahankan kabupaten ini sebagai daerah penghasil pertanian. Dengan arahan seperti itu, tentu perlu diwaspadai dampak yang akan terjadi terhadap tinggalan-tinggalan di kawasan Trowulan sebagai akibat arahan kebijakan pembangunan tersebut. Dalam peta kebijakan pembangunan regional (provinsi), kawasan Trowulan memang akan tetap berada pada daerah rural. Namun, dalam konteks pengembangan wilayah Kecamatan Trowulan secara lebih rinci, kawasan Trowulan yang padat tinggalan Majapahit termasuk wilayah pengembangan ibukota kecamatan Trowulan, yang meliputi desa-desa Trowulan, Bejijong, dan Kejagan. Ketiganya akan menjadi Bagian Wilayah Kota (BWK). Perencanaan tersebut tentu akan memberikan dampak bagi kelestarian tinggalan Majapahit yang terdapat di kawasan ini. Dalam kenyataannya, di beberapa tempat yang tidak jauh dari kawasan Trowulan telah muncul beberapa industri yang cukup besar.

Selain di kawasan Trowulan, sebagian tinggalan Majapahit terdapat juga di Kabupaten Jombang. Di daerah ini, telah muncul berbagai industri yang cukup besar. Keberadaannya juga berpotensi akan mengakibatkan perkembangan lanjutan sebagai efek ganda (*multiplier effects*) yang sangat mungkin mengubah tata guna lahan di daerah tersebut. Hal ini telah dibuktikan dengan dialihfungsikan tanah pertanian yang dulunya adalah jejak kanal Majapahit menjadi jalan lingkar Kota Jombang.



Gambar 19. Jalur kanal Kuno dijadikan jalan lingkar di daerah Jombang

Pertumbuhan sektor industri (yang bukan agro-industri) di sekitar kawasan Trowulan yang padat tinggalan Majapahit juga akan menurunkan kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk upaya pelestarian tinggalan Majapahit. Kepadatan industri seperti ini akan meningkatkan polusi air dan udara yang merupakan ancaman bagi kelestarian warisan budaya bendawi yang umumnya terbuat dari bata

F. KESADARAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kelestarian warisan budaya Majapahit adalah tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan dan arti penting warisan budaya tersebut. Kesadaran akan warisan budaya biasanya dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu kesadaran sejarah (*history awareness*) dan kesadaran berwarisan budaya (*heritage awareness*). Dalam kasus tinggalan Majapahit, pada umumnya kesadaran masyarakat dan sebagian pihak pemerintah baru sampai pada kesadaran sejarah. Artinya, mereka memahami dan tahu dengan persis peran penting kerajaan Majapahit dalam sejarah bangsa Indonesia. Mereka juga tahu bahwa tinggalan yang di kawasan Trowulan adalah tinggalan kerajaan yang berperan besar dalam sejarah mereka. Namun, mereka tidak mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap tinggalan-tinggalan itu. Bagi mereka, tinggalan-tinggalan hanyalah sisa-sisa kejayaan sejarah masa lampau saja. Akibatnya, walaupun mereka tahu keberadaan tinggalan Majapahit dan menemukannya, mereka kurang peduli dan seringkali dengan mudah menghancurkan untuk kepentingan yang lain. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak memiliki kesadaran berwarisan budaya. Tinggalan-tinggalan itu bukan warisan yang penting bagi mereka, sehingga tidak dihargai. Kesadaran berwarisan budaya berarti mempunyai rasa cinta dan menumbuhkan keinginan untuk melestarikan sebagai wujud penghargaan mereka terhadap tinggalan-tinggalan tersebut.

Ketiadaan kesadaran berwarisan budaya ini yang menyebabkan berbagai pihak yang seharusnya ikut melestarikan warisan budaya Majapahit justru membuat kebijakan atau tindakan yang mengancam atau mengakibatkan kerusakan tinggalan-tinggalan tersebut. Gejala seperti ini tidak saja terjadi pada masyarakat setempat, tetapi juga pemerintahan. Pengalihfungsian kanal-kanal Majapahit menjadi jalan lingkar (di Kabupaten Jombang) dan tempat parkir (di Trowulan) merupakan contoh tidak adanya kesadaran berwarisan budaya itu di lingkungan aparat pemerintahan.

Masyarakat juga masih pada taraf kesadaran sejarah, tetapi belum pada kesadaran berwarisan budaya. Banyak tinggalan Majapahit yang diperoleh masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengelola sesuai dengan UU RI no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan perangkat hukum turunannya. Mereka lebih senang menyerahkan atau menjual kepada pihak lain yang memberi imbalan lebih besar. Selain itu, tidak sedikit tinggalan yang justru dihancurkan di tempat. Sebagian lagi bahkan dihaluskan untuk campuran pembuatan bata. Hal-hal ini menunjukkan masih terbatasnya kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan warisan budaya Majapahit.

Di sisi yang lain, apabila ada kesadaran berwarisan budaya, seringkali cara-cara pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat tanpa disadari justru tidak melestarikan warisan budaya itu sendiri. Banyak pihak yang memiliki kesadaran berwarisan budaya melakukan revitalisasi warisan budaya dengan cara yang tidak tepat sehingga nilai penting warisan budaya itu justru menurun. Contoh nyata dari kecendrungan ini adalah pendirian bangunan gedung baru yang megah di Makam Troloyo. Demikian juga, pemugaran beberapa bangunan kuno Majapahit untuk kepentingan ziarah lainnya, seperti di Makam Putri Campa, Pendopo Agung, dan Sitihinggil.

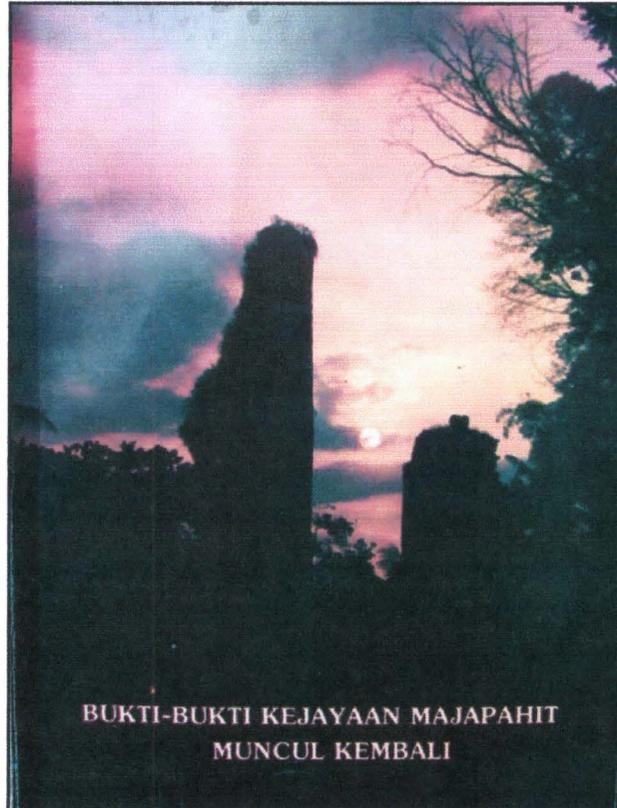


Gambar 19. Cara Penanganan situs yang salah merupakan ancaman kelestarian juga

G. KEBIJAKAN PELESTARIAN

Sebenarnya pemerintah pusat dan pemerhati pelestarian telah lama berupaya untuk melestarikan warisan budaya Majapahit. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sejumlah penelitian dan pemugaran dilakukan. Bahkan, beberapa pelestari tinggalan Majapahit mendirikan lembaga khusus "*Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit*" yang amat peduli terhadap kelestarian tinggalan Majapahit. Mereka mengumpulkan berbagai tinggalan yang sempat diselamatkan sehingga memenuhi rumah Maclaïne Pont dan R.A.A. Kromodjojo Adinegoro di Trowulan. Dalam perkembangannya, "*Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit*" kemudian menjadi salah satu bagian (semacam kantor cabang) dari Dinas Purbakala sejak tahun 1963, dibawah seorang ahli arkeologi Drs. Soediman. Selanjutnya, setelah mengalami beberapa kali ganti nama, kini kantor ini bernama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan.

Sejak itulah pelestarian tinggalan-tinggalan Majapahit menjadi tanggung jawab kantor ini. Berbagai kegiatan pelestarian melalui upaya penyelamatan, penelitian, dan pemugaran. Namun, semua itu merupakan bagian kegiatan yang bersifat insidental tanpa arah dan perencanaan yang jelas. Baru pada tahun 1980-an, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk menyusun rencana induk pelestarian tinggalan Majapahit di Trowulan. Rencana induk yang selesai tahun 1985 ini sesungguhnya telah dirancang dengan sangat komprehensif dengan berdasarkan konsep pelestarian yang cukup tepat. Namun demikian, amat disayangkan, rencana induk ini tidak pernah diterapkan dan dijadikan perangkat hukum yang mengikat sehingga fungsi pengendaliannya efektif.



Gambar 20. Rencana induk pelestarian tinggalan Majapahit di Trowulan yang dibuat tahun 1985

Karena itu, dapat dikatakan hingga kini tidak ada kebijakan, strategi, dan arahan manajemen yang jelas dan konseptual untuk melestarikan warisan budaya. Dalam kondisi seperti ini, visi dan misi pelestarian kawasan Trowulan yang padat tinggalan Majapahit menjadi tidak jelas. Ketiadaan konsep pelestarian yang jelas ini kemudian menimbulkan banyak persoalan. Setiap pihak yang mempunyai kepedulian dan berniat untuk ikut melestarikan tinggalan Majapahit (para *stakeholders*) melakukan berbagai kegiatan sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing. Sementara itu, tekanan kebutuhan hidup masyarakat dan peningkatan pembangunan terus mengancam kelestarian warisan budaya Majapahit.

Pihak-pihak yang seharusnya ikut menjaga kelestarian tinggalan-tinggalan itu pun tidak mampu menerapkan manajemen pelestarian yang efektif. Masyarakat setempat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pelestarian, sehingga kesadaran berwarisan budaya dan keterikatan batin dengan tinggalan Majapahit tidak pernah tumbuh. Selain itu, masyarakat juga tidak pernah merasakan keberadaan tinggalan Majapahit dapat ikut meningkatkan kesejahteraan mereka. Warisan budaya Majapahit dianggap tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan mereka, karena itu dianggap tidak memiliki nilai penting bagi kehidupan mereka.

Sementara itu, fenomena perubahan iklim global (global warming) dan resiko bencana alam (a.l. lumpur Lapindo, gempa bumi) juga menjadi ancaman bagi kelestarian tinggalan Majapahit yang pada umumnya terbuat dari bahan yang rentan terhadap perubahan iklim (bata). Tanpa ada kebijakan pelestarian yang komprehensif dan jelas, ancaman-ancaman ini seperti ini tidak akan dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Tidak adanya kebijakan, strategi, dan arahan manajemen yang konseptual, jelas dan terpadu menyebabkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) melakukan upaya pelestarian menurut keinginannya masing-masing. Masyarakat setempat yang tidak dilibatkan dalam pelestarian merasa tinggalan Majapahit tidak bermanfaat nyata bagi kehidupan mereka, sehingga tidak peduli akan kelestariannya

BAB IV

KONSEP PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Berbagai isu strategis dan potensi ancaman terhadap kelestarian warisan budaya Majapahit semakin mendorong perlunya segera dilakukan upaya-upaya pelestarian yang terpadu dan berkelanjutan. Upaya pelestarian yang baik tentu harus dilandasi oleh konsep-konsep yang jelas dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Konsep-konsep inilah yang akan menjadi landasan berpijak setiap kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan.

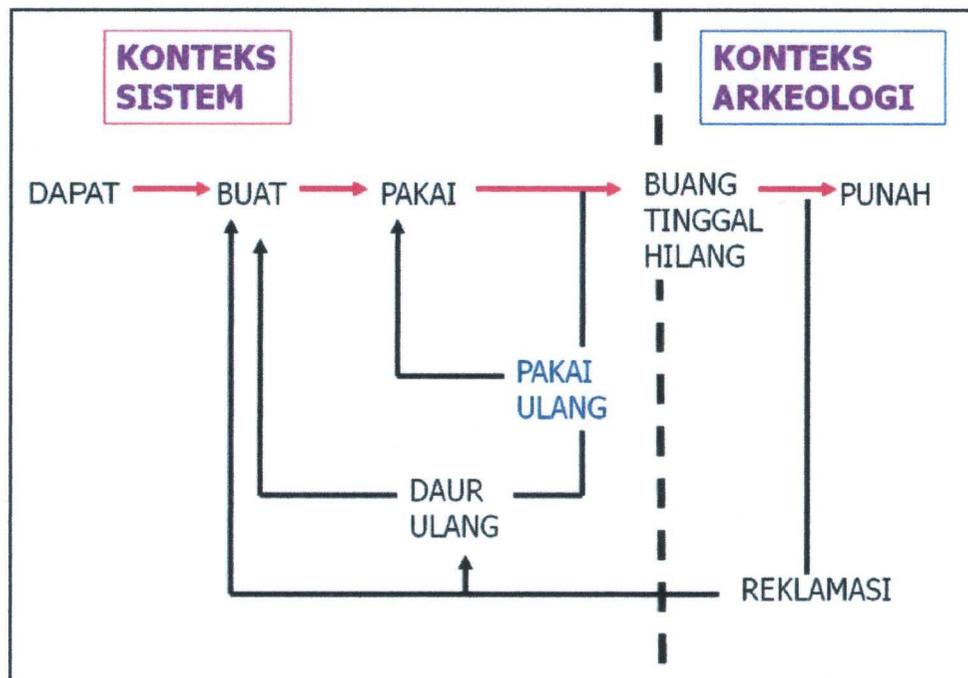
A. KONSEP-KONSEP DASAR

Sejak lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini, warisan budaya telah dianggap sebagai sumberdaya (*resources*). Artinya, warisan budaya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas, baik untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, bahkan secara ekonomis dilihat sebagai daya tarik wisata dan komoditas. Namun, bagaimana pun juga disadari bahwa sumberdaya itu bersifat terbatas (*finite*), khas (*unique*), tak-teperbaharui (*non-renewable*), tak-terkembalikan (*irreversible*), serta kontekstual (*contextual*). Kesadaran ini lalu mendorong munculnya manajemen sumberdaya budaya (*cultural resource management*) dengan tujuan untuk mengelola sumberdaya budaya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, selama mungkin untuk kepentingan masyarakat luas.

Hakekat pelestarian

Karya budaya manusia merupakan suatu yang bersifat dinamis dan selalu mengalami proses transformasi. Perjalanan budaya manusia dengan bukti-bukti bendawinya selalu mengalami pasang surut, pengurangan dan penambahan, penggantian, dan tidak jarang akhirnya akan ditinggalkan dan hilang. Proses transformasi karya budaya manusia dapat digambarkan dalam skema berikut (Schiffer, 1985).

PROSES TRANSFORMASI KARYA BUDAYA MANUSIA



Konteks Sistem adalah lingkungan tempat suatu karya budaya itu masih digunakan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, sedangkan konteks arkeologi yaitu lingkungan tempat suatu karya budaya tidak lagi digunakan atau berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari skema tersebut, dapat dipahami bersama bahwa suatu karya budaya itu, baik itu berupa gagasan, tindakan, maupun budaya bendawi, akan mengalami proses (1) mendapatkan bahan, (2) membuatnya menjadi karya budaya, (3) menggunakannya, dan setelah dirasakan tidak dapat dipakai lagi akan (4) dibuang atau hilang. Kalau karya budaya itu berupa benda, maka benda itu lalu disebut benda arkeologi atau seringkali dianggap sebagai monumen mati (*dead monument*) karena pendukung budaya itu sudah tidak ada lagi. Kalau suatu karya budaya dirasakan masih berguna, maka karya budaya itu akan dipakai lagi (reuse), atau mengalami daur ulang, yaitu digunakan kembali setelah mengalami perubahan-pengubahan tertentu. Karya budaya yang mampu bertahan terus melintasi perubahan jaman disebut sebagai **tradisi** atau **warisan budaya hidup** (*living heritage*). Sebaliknya, karya budaya yang sudah masuk ke dalam konteks arkeologi dapat ditemukan kembali dan jika dirasakan akan berguna bagi masyarakat sekarang, karya budaya itu akan di-reklamasi atau di-revitalisasi. Artinya, dimasukkan kembali menjadi bagian dari budaya yang hidup.

Selama ini, ada kesan seolah-olah yang dilestarikan hanyalah wujud bendawi dari karya budaya, yang kemudian dikenal sebagai **benda cagar budaya**. Pandangan seperti ini tidak tepat. Upaya pelestarian yang sesungguhnya, bukanlah semata-mata melestarikan benda cagar budaya, tetapi yang tidak kalah penting adalah melestarikan nilai-nilai budaya luhur yang ada di balik benda-benda tersebut. Karena itu, perlu dipahami bahwa tidak semua karya budaya bendawi harus dilestarikan. Hanya karya budaya yang mempunyai nilai penting saja yang perlu dilestarikan. Hal ini juga secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang RI no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Di dalam UU ini, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah : semua benda buatan manusia, benda alam, dan situs yang dianggap mempunyai *nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan*.

Arahan Tujuan Pelestarian

Dalam kaitannya dengan pelestarian warisan budaya, azas pemanfaatannya harus dilandasi oleh cara pandang yang luas dan bijak. Konsep pelestarian seharusnya didasari oleh tiga anutan nilai yang terkait dengan tujuan pelestarian itu sendiri, yaitu Nilai Kegunaan, Nilai Pilihan, dan Nilai Keberadaan (Darvill, 1995)

Nilai kegunaan (*Use-value*) lebih menekankan pada bagaimana kita sekarang dapat memanfaatkan BCB tersebut, misalnya untuk obyek penelitian arkeologi atau bidang ilmu lain, sumber ilham karya seni, pendidikan, sarana rekreasi dan wisata, membentuk citra (dalam iklan), memperkuat jati diri dan solidaritas komunitas, atau juga sumber bisnis yang sangat menguntungkan (a.l. perdagangan BCB, untuk souvenir, bahan publikasi).

Nilai pilihan (*Option value*) lebih menekankan pada tekad untuk menyelamatkan BCB sebagai simpanan untuk generasi mendatang. Asumsinya, kita harus menyisakan BCB sebagai sumberdaya budaya untuk masa mendatang, meskipun saat ini kita belum tahu akan kebutuhannya di masa mendatang, karena BCB memang warisan untuk generasi yang akan datang juga. Prinsip utama pendukung nilai pilihan ini adalah menjaga stabilitas BCB agar tidak mengalami perubahan sama sekali.

Nilai keberadaan (*Existence value*) berkaitan erat dengan perasaan puas atau senang jika BCB itu dipastikan masih tetap ada, walau pun kegunaannya tidak dirasakan sama sekali. Pendukung nilai ini merasa puas kalau bisa mendapatkan kepastian bahwa sumberdaya itu akan bertahan (*survive*) atau tetap eksis (*in existence*).

Jadi, di sini perlu ditekankan bahwa nilai penting warisan budaya tidak harus dirasakan pada saat ini secara langsung, tetapi akan dirasakan di masa mendatang sebagai hasil investasi kita di masa kini. Mungkin saat ini kita tidak benar-benar tahu apa manfaatnya, tetapi dengan melestarikannya sejak sekarang, kita tidak akan kecewa di kemudian hari. Sebaliknya, kita akan merasa bangga dan mensyukuri apa yang telah kita lakukan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kita akan mendapat penghargaan dari generasi-generasi penerus kita.

Tiga Aspek Pelestarian

Upaya pelestarian pada dasarnya dapat diwujudkan dalam tiga bentuk kebijakan dan kegiatan yang meliputi **perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan**.

Perlindungan dilakukan terutama pada warisan budaya bendawi, baik **secara fisik** maupun **hukum**. Bentuk perlindungan disesuaikan dengan tataran warisan budaya yang ada. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk menghindarkan kerusakan atau merosotnya nilai penting warisan budaya bendawi dengan cara pengamanan dan perawatan langsung terhadap bendanya. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya penyusunan, penetapan, dan penegakan ketentuan atau peraturan yang berkuatan hukum (termasuk pedoman yang diundangkan) dalam rangka menjamin kelestarian warisan budaya bendawi.



Gambar 21. contoh perlindungan fisik dengan memberi atap pelindung bagi warisan budaya bendawi. Foto Bangunan Pelindung Sentonorejo)

Pemanfaatan berarti menggunakan warisan budaya untuk kepentingan-kepentingan yang dirasakan di masa kini, sesuai dengan nilai-nilai penting yang terkandung dalam warisan budaya tersebut (*use value*).

Pengembangan berarti meningkatkan dan meluaskan nilai-nilai penting (warisan budaya tak-bendawi) yang terkandung dalam warisan budaya agar dapat membawa kegunaan yang lebih besar bagi masyarakat.



Gambar 22. Perlindungan hukum dilakukan dengan penetapan ketentuan atau aturan yang berkekuatan hukum

Ada banyak cara untuk memanfaatkan warisan budaya di masa kini antara lain sebagai berikut (Darvill, 1995).

- **Penelitian Arkeologi.** Kajian untuk menemukan pengetahuan dan informasi tentang masa lampau, sehingga dapat memberikan gambaran tentang masa lampau yang diharapkan akan membawa berbagai kegunaan di masa kini
- **Penelitian Ilmiah lain.** Ada banyak bidang ilmu yang kajiannya didasarkan pada warisan budaya, terutama ilmu yang membutuhkan informasi dari masa lampau untuk mengetahui proses panjang yang dialami obyek kajiannya
- **Seni kreatif.** Seniman kriya, pelukis, penari, penulis buku fiksi, penyair, fotografer, sineas, dan banyak lagi profesional di bidang seni yang dapat memanfaatkan warisan budaya sebagai pencetus ilham untuk membuat karyanya
- **Pendidikan.** Warisan budaya menempati kedudukan yang penting dalam pendidikan baik bagi orang dewasa maupun anak-anak, terutama dalam proses enkulturasi nilai-nilai luhur
- **Rekreasi dan Wisata.** Di banyak tempat telah terbukti, warisan budaya merupakan salah satu sarana rekreasi dan wisata yang menarik perhatian banyak pengunjung. Warisan budaya dilihat sebagai sesuatu yang unik dan menarik dari masa lampau, sehingga ada yang beranggapan bahwa mengunjungi dan menikmati warisan budaya seakan “berwisata ke negeri lain”



Gambar 22. Pemanfaatan warisan budaya untuk penelitian arkeologi

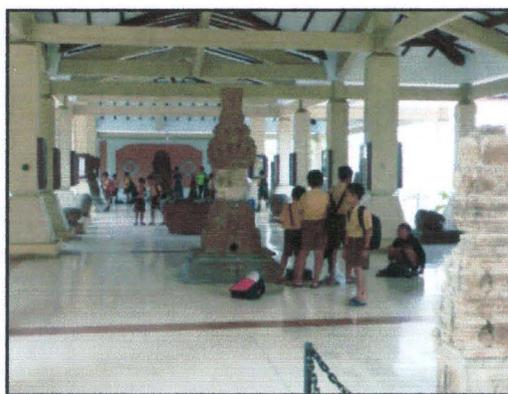


Gambar 23. Warisan budaya dan situs dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmu lain, di antaranya geologi

- **Simbolis.** Warisan budaya seringkali digunakan sebagai lambang-lambang yang memberikan citra tertentu, baik itu yang mampu mengangkat status sosial maupun sebagai lambang-lambang ideologi tertentu
- **Legitimasi.** Warisan budaya dapat dimanfaatkan sebagai legitimasi bagi suatu tindakan atau kebijakan tertentu, bahkan tidak jarang penguasaan atas wilayah tertentu dilegitimasi berdasarkan keberadaan warisan budaya tertentu di wilayah tersebut
- **Solidaritas Sosial dan rasa persatuan.** Pemanfaatan warisan budaya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan, terutama jika kesadaran berwarisan budaya telah tumbuh di antara komunitas tersebut.
- **Ekonomis.** Sejak dulu, salah satu manfaat warisan budaya adalah sebagai sarana mencapai keuntungan ekonomis, baik itu melalui jual beli warisan bendawi secara langsung maupun keuntungan yang tidak langsung dari hasil pemanfaatan warisan budaya sebagai tempat wisata, ekonomi kreatif, kunjungan museum, dan komodifikasi warisan budaya. Namun, pemanfaatan ekonomis ini sering pula berdampak negatif terhadap kelestarian warisan budaya.



Gambar 24. Warisan budaya memberikan ilham untuk penciptaan karya kreatif



Gambar 25. Warisan budaya dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan



Gambar 26. Daya tarik warisan budaya dapat dikembangkan menjadi tempat rekreasi dan tujuan wisata yang menarik



Gambar 27. Warna merah dan putih dianggap sebagai warisan budaya dari Jaman Prasejarah sehingga kini digunakan sebagai bendera negara Republik Indonesia

Berbagai konsep dasar yang telah dipaparkan di atas akan menjadi filosofi dan arahan dalam menyusun konsep kebijakan pelestarian kawasan Trowulan. Tentu dalam prakteknya tidak semua konsep ideal di atas dapat diterapkan pada pelestarian dan pengembangan di Kawasan Trowulan. Berbagai aspek konsep akan disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan, nilai-nilai penting warisan budaya, dan cita-cita pelestarian yang ingin diraih.

B. VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan konsep-konsep dasar pelestarian serta nilai-nilai penting warisan budaya Majapahit, kiranya dapat dirumuskan landasan dasar cita-cita pelestarian untuk kawasan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya Majapahit. Cita-cita pelestarian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk visi dan misi berikut ini.

1. Visi :

Kawasan Cagar Budaya Majapahit yang lestari, mampu menjadi jatidiri bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Misi :

- Melestarikan warisan budaya Majapahit untuk masa kini, mendatang, dan seterusnya secara berkelanjutan
- Meneliti warisan budaya Majapahit secara interdisiplin maupun multidisiplin untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan dan nilai-nilai luhur Majapahit
- Menyajikan berbagai warisan budaya Majapahit, baik yang bendawi maupun tak-bendawi, secara menarik dan informatif agar dapat menjadi sarana pendidikan dalam rangka menumbuhkan jati diri dan membentuk watak bangsa yang luhur
- Menata kawasan cagar budaya Majapahit agar dapat dinikmati sebagai daya tarik wisata yang unggul dan mendukung pelestarian warisan budayanya
- Mengembangkan kawasan cagar budaya Majapahit agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian

C. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan cita-cita pelestarian tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan umum yang akan menjadi dasar tersusunnya langkah atau tindakan strategis yang harus direncanakan. Kebijakan umum ini akan meliputi pokok-pokok yang terkait dengan lingkup keruangan kawasan ini dan tiga aspek pelestarian (perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan)

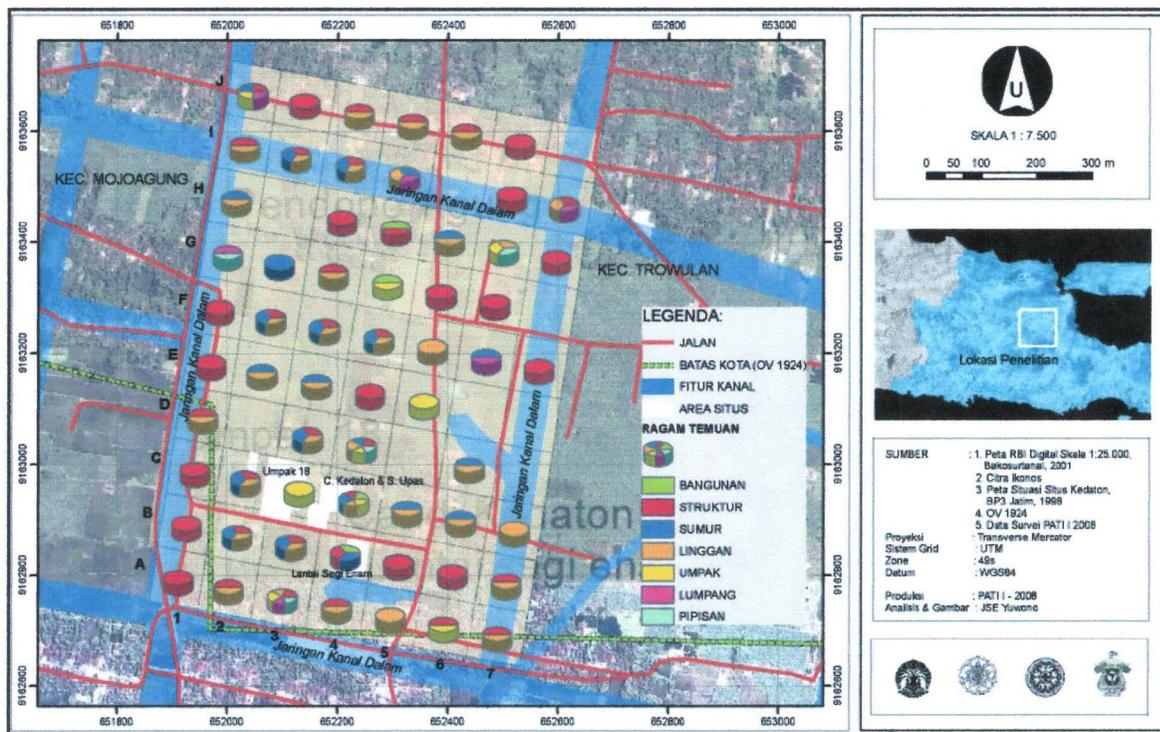
Aspek Keruangan

Banyaknya jumlah dan jenis temuan artefaktual, ekofaktual, dan fitur di kawasan Trowulan telah menghantar pada dugaan bahwa daerah ini merupakan kota pusat Kerajaan Majapahit. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, hingga kini belum diperoleh kesepakatan tentang luasan wilayah pusat kerajaan ini. Karena itu, untuk menetapkan luasan wilayah yang akan dimasukkan ke dalam kawasan pelestarian digunakan tiga pertimbangan utama, yaitu kerapatan temuan warisan budaya bendawi Majapahit, tingkat ancaman terhadap kelestarian warisan budaya tersebut, serta hipotesis luasan “kota” atau pusat kerajaan Majapahit, baik berdasarkan rekonstruksi dari sumber sejarah maupun konsepsi kosmologis.

■ Kerapatan temuan

Prinsip pelestarian yang dianut di sini adalah pelestarian terpadu antara warisan budaya bendawi dan tak-bendawi (nilai-nilai budaya). Aspek keruangan lebih terkait dengan warisan budaya bendawi. Karena itu, sebaran (distribusi), kekerapan (frekuensi), dan kerapatan (densitas) menjadi rujukan penting untuk menentukan prioritas wilayah yang hendak dilestarikan. Untuk mengetahui ketiga variabel tersebut, kajian hasil-hasil penelitian arkeologis dan pengamatan di lapangan dilakukan. Salah satu hasil penelitian yang secara komprehensif dapat menunjukkan kondisi di lapangan yang terkait dengan tiga variabel adalah hasil survei intensif yang dilaksanakan dalam kegiatan Indonesian Field School of Archaeology di Trowulan selama tiga tahun berturut-turut (1991-1993). Survei intensif dilakukan pada area seluas 11 km x 9 km, dengan metode transek. Pusat dari areasurvei adalah sisi selatan Kolam Segaran. Hasilnya menunjukkan ada pola sebaran radial yang cukup jelas, dari bagian tengah area survei yang mempunyai kepadatan tinggi, semakin menjauh semakin berkurang temuannya. Dari pertanggalan relatif temuan, ada petunjuk daerah sekitar Kolam Segaran lebih banyak mengandung temuan yang berpertanggalan lebih tua dibanding area survei di luarnya.

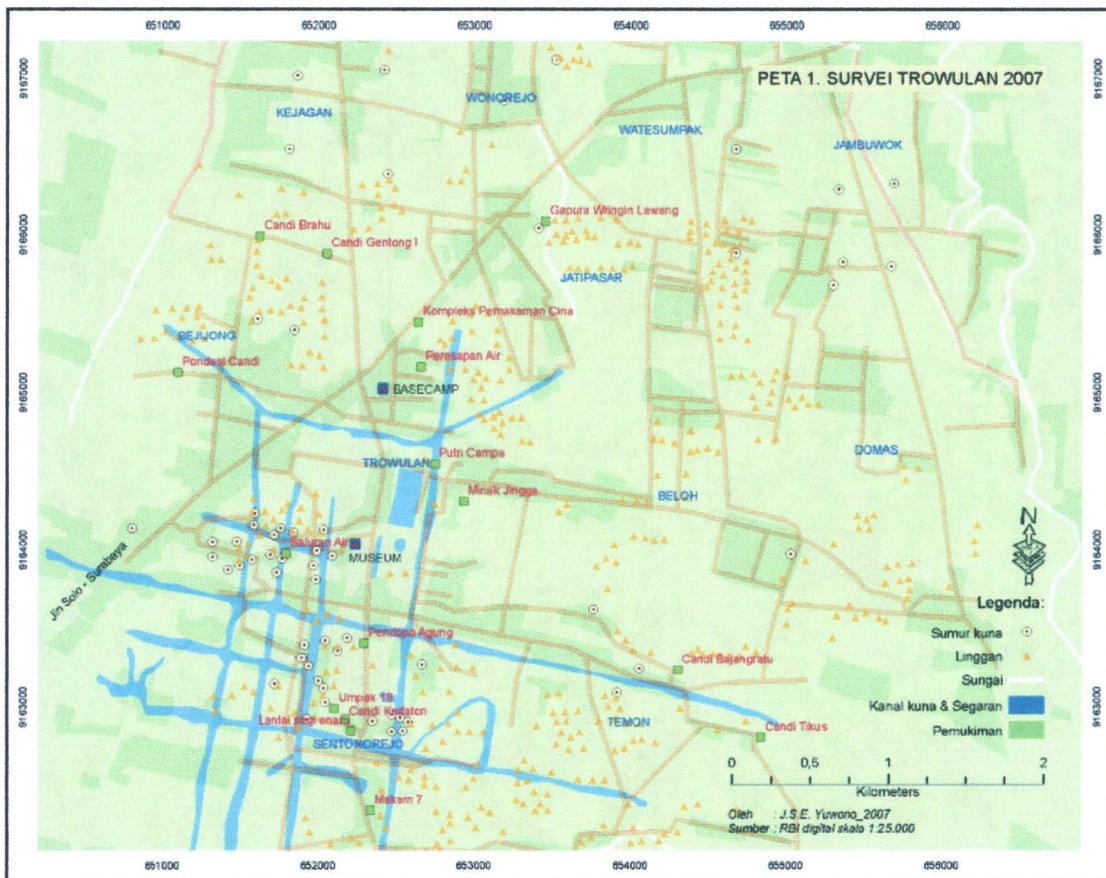
Hasil penelitian lanjutan di area yang sama juga secara cukup konsisten menunjukkan daerah di sebelah selatan segaran mempunyai kepadatan temuan yang paling tinggi.



Gambar 28. Sebaran temuan dengan kepadatan tinggi di Kanal Dalam sebagai petunjuk pusat kota Majapahit

■ Tingkat ancaman

Pengamatan terhadap kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian warisan budaya Majapahit juga memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa daerah dengan tingkat kepadatan temuan yang tinggi justru menjadi area kegiatan pengolahan tanah yang juga tinggi, terutama berupa kegiatan pembuatan bata. Kecenderungan ini rupanya tercipta karena beberapa alasan. Pertama, pembuat bata akan mencari jenis tanah yang paling baik untuk membuat bata, yang ternyata justru ada di tempat-tempat dengan kepadatan temuan tinggi. Kedua, bata kuno dianggap sebagai bata yang berkualitas tinggi, sehingga dapat dijual dengan harga tinggi atau didaur ulang dengan cara dihaluskan untuk semen merah yang mempunyai daya rekat sangat baik. Karena alasan itu, pemilihan lahan padat temuan untuk tempat pembuatan bata dapat memberikan keuntungan lebih. Ketiga, ada kegiatan tersembunyi di balik pembuatan bata, yaitu mencari benda-benda tinggalan Jaman Majapahit yang dapat dijual sebagai “barang antik” dengan harga yang cukup tinggi. Dengan alasan-alasan tersebut, dapat dipahami apabila daerah yang paling banyak mengandung tinggalan Majapahit justru menghadapi ancaman kerusakan yang tinggi pula. Karena itu, wilayah-wilayah seperti ini perlu mendapat perlindungan yang lebih tinggi.



Gambar 29. Sebaran Linggian menunjukkan tingkat ancaman yang tinggi terhadap tinggalan di pusat kota Majapahit

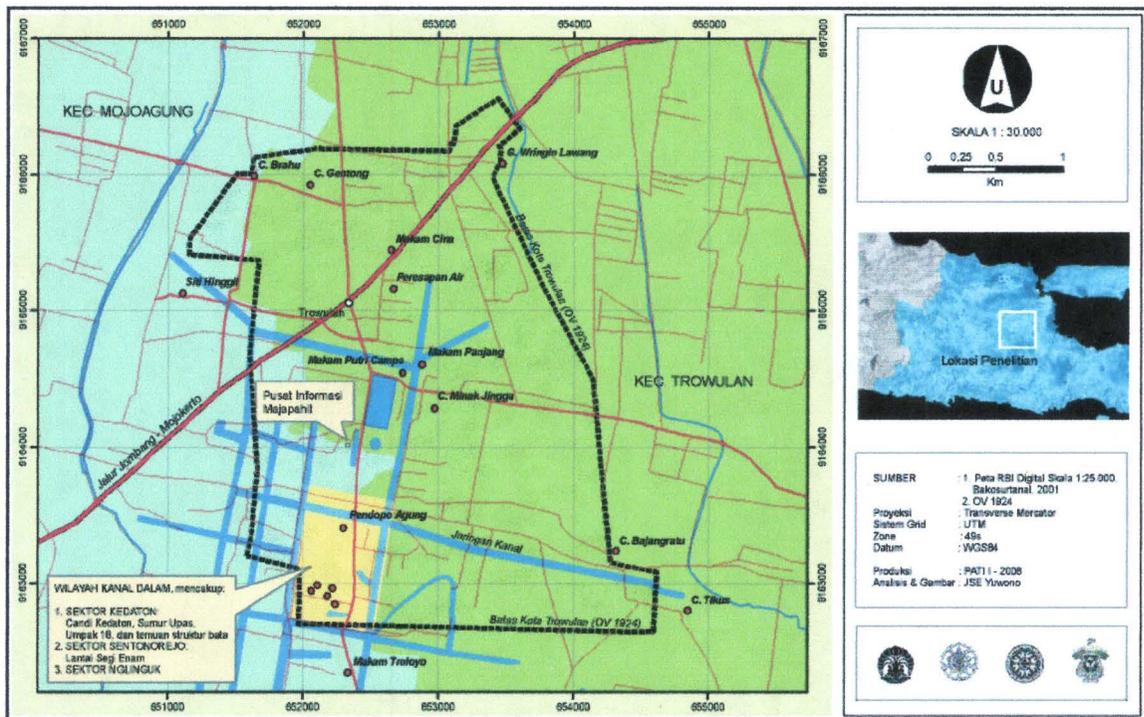
Konsep Pelestarian dan Pengembangan

■ Hipotesis kota pusat kerajaan

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian terdahulu, beberapa hipotesis telah dikemukakan terkait dengan letak pusat kota Majapahit. Walaupun ada pendapat yang mengemukakan bahwa kota Majapahit dibatasi oleh garis khayal (imajiner) yang menghubungkan empat tugu batas (patok) di Lebak Jabung, Japanan (Sedah), Badas, dan Klinterejo, namun sejauh ini hasil survei belum mendukung luasan wilayah kota ini. Bagian barat area yang dibatasi keempat tugu batas tersebut cenderung hanya sedikit mengandung temuan. Sementara itu, lebih banyak ahli yang cenderung menempatkan pusat kota Majapahit, berdasarkan toponim dan temuan, di sekitar area yang ditempati oleh jaringan bekas kanal, dengan pusatnya di dekat Kolam Segaran atau bangunan Balai Penyelamatan temuan milik BP3 Trowulan. Hipotesis ini memang cukup sesuai dengan sebaran dan tingkat kepadatan temuan.

■ Rekonstruksi sumber sejarah

Berdasarkan tafsiran beberapa naskah yang dapat memberikan gambaran kota Majapahit, ada petunjuk bahwa pusat kota Majapahit memang berada di sekitar Kolam Segaran. Bahkan, MacClaine Pont telah menetapkan batas-batas kota berdasarkan keterangan dari Nagarakrtagama. Pendapat lain menyatakan, pada awalnya pusat kota berada di sebelah selatan (Situs Kedaton, Sumur Upas, Umpak Batu, dan Sentonorejo), tetapi kemudian dipindahkan ke sekitar Kolam Segaran.



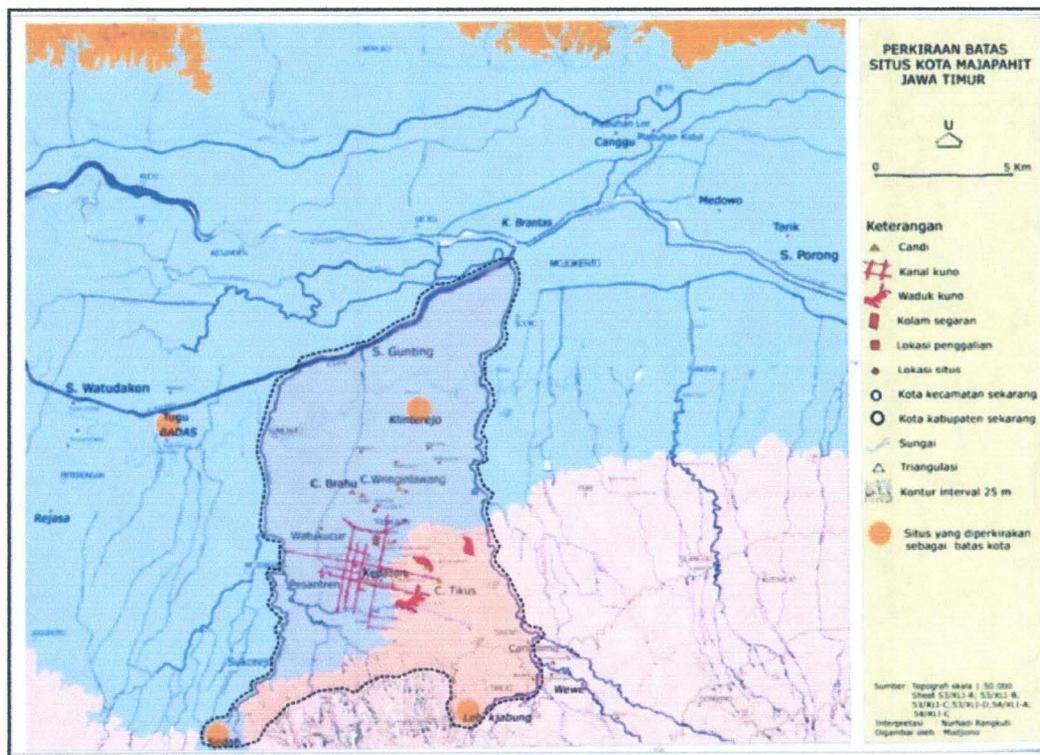
Gambar 30. Batas Kota Majapahit menurut tafsiran Maclaine Pont

Konsep Pelestarian dan Pengembangan

■ Konsepsi kosmologi

Pemilihan lokasi pusat kota atau kraton dalam tradisi masyarakat Jawa Kuno selalu merujuk pada konsep kosmologis, dengan anggapan bahwa kota atau kraton adalah bentuk kecil dari makrokosmos. Gambaran alam semesta (makrokosmos) yang dibayangkan sebagai bentuk lingkaran konsentris antara daratan dan air yang tersusun berselang-seling dengan pusat dunia di tengahnya, acapkali diwujudkan dengan menempatkan pusat kota di daratan yang dikelilingi oleh sungai, atau setidaknya diapit oleh dua sungai. Pola ini masih dapat dilihat dari pemilihan kota-kota Mataram Islam. Dapat diduga, konsepsi seperti ini juga diterapkan dalam pemilihan kota Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kawasan Trowulan yang padat temuan Majapahit di bentang lahan yang diapit oleh Kali Gunting di barat, Kali Brangkal di timur, dan Kali Ngonto di utara. Di sisi selatan terdapat rangkaian gunung Anjasmoro yang juga dianggap sebagai orientasi magis bagi kota Majapahit. Dalam konsep lanskap budaya Hindu-Budha, gunung atau pegunungan dianggap sebagai bagian suci tempat para dewa tinggal. Di Bali konsep ini terwujud dalam orientasi kaja (gunung) – kelod (laut).

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah dipaparkan di atas, maka luasan kawasan pelestarian akan merujuk pada lanskap budaya Hindu-Budha yang rupanya diterapkan pada penempatan lokasi kota Majapahit. Kawasan pelestarian ini meliputi wilayah dengan batas-batas sebagai berikut.



Gambar 31. Sketsa Prinsip Batas Kawasan Makro

Konsep Pelestarian dan Pengembangan

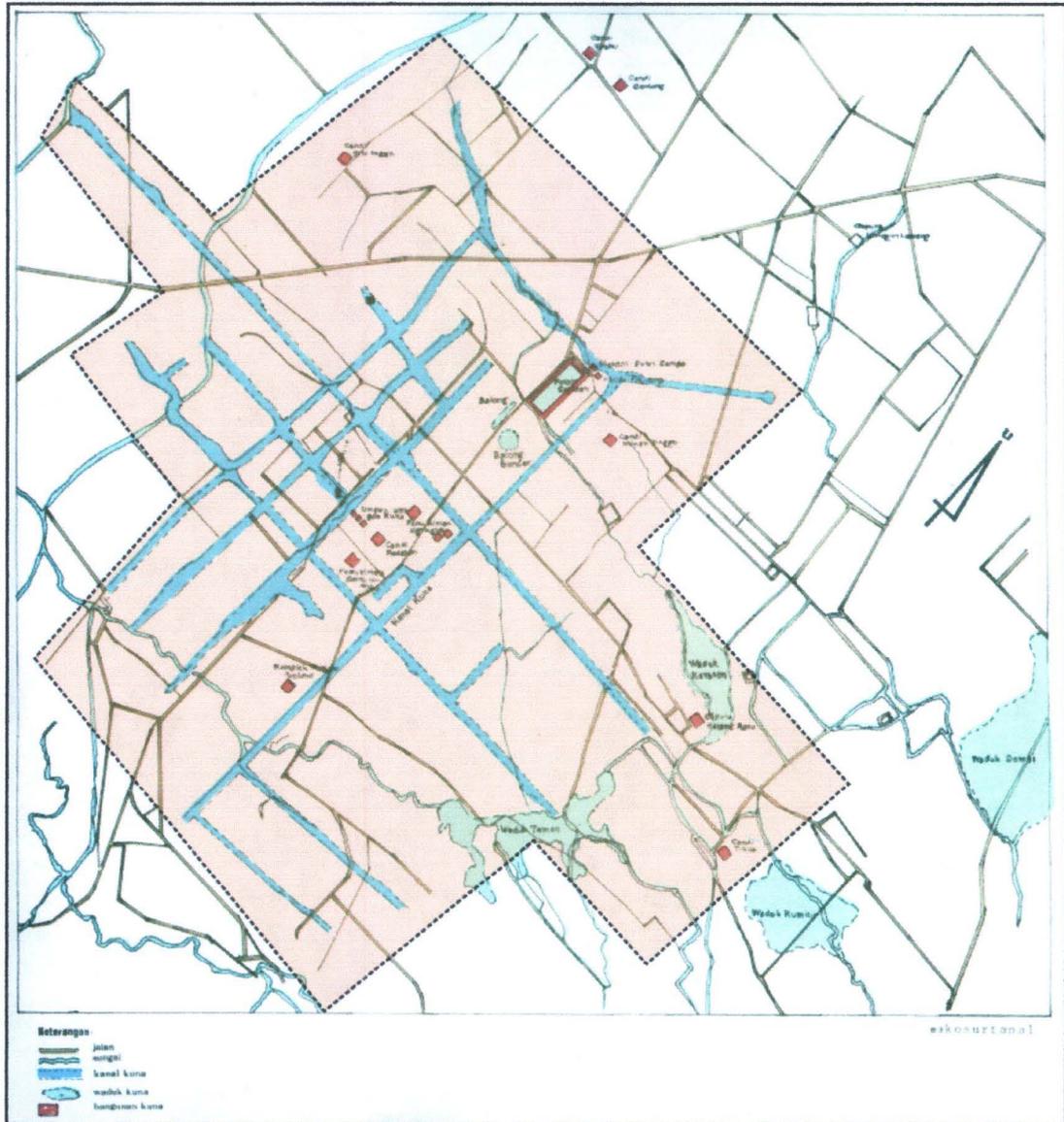
- Di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Brangkal mulai dari hulunya yang berada di lereng Gunung Welirang (termasuk wilayah Wewe dan Candi Limo yang sering dikunjungi Raja Hayamwuruk)
- Di sebelah selatan dibatasi oleh garis kontur yang merupakan ujung kaki Gunung Welirang dan Anjasmoro, mulai dari Tugu Lebak Jabung hingga Tugu Japanan dan berakhir pada hulu Kali Gunting
- Di sebelah barat dibatasi oleh aliran Kali Pancir yang mengalir arah selatan – utara dan berlanjut pada Kali Gunting hingga bergabung dengan Kali Ngonto di sudut barat laut kawasan ini
- Di sebelah utara dibatasi oleh Kali Ngonto yang mengalir arah timur – barat hingga bertemu dengan Sungai Brangkal di sudut timur laut kawasan ini

Luas kawasan pelestarian yang telah ditentukan ini sekitar 127 km² (perhitungan kasar sementara). Karena luasan yang cukup besar, dalam rangka penyusunan strategi pelestarian dan pengelolaannya, kawasan ini selanjutnya akan dibagi menjadi tiga jenjang keruangan.

- **Tataran Makro**, yang meliputi seluruh kawasan pelestarian yang batas-batasnya telah disebutkan di atas. Ada beberapa alternatif penyebutan untuk kawasan pelestarian tersebut, antara lain **Kawasan Cagar Budaya Majapahit** (*Majapahit Conservation Area*), **Taman Purbakala Majapahit** (*Majapahit Archaeological Park*), **Kawasan Kota Kuno Majapahit** (*Majapahit Ancient City Area*), **Taman Nasional Budaya Majapahit** (*Majapahit Cultural National Park*), atau **Taman Kota Bersejarah Majapahit** (*Majapahit Historic City Park*). Nama-nama ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap visi dan misi pelestariannya, karena itu masih harus dipertimbangkan dengan seksama. Untuk sementara, nama yang akan digunakan dalam konsep kebijakan ini adalah **Kawasan Cagar Budaya Majapahit**.
- **Tataran Meso**, yang merujuk pada wilayah yang ditempati bekas-bekas jaringan kanal kuno, termasuk wilayah dengan kandungan temuan arkeologis tinggi terutama di wilayah jaringan kanal dalam (sekitar Kolam Segaran, Balai Penyelamatan/Calon Pusat Informasi Majapahit di utara membujur ke selatan hingga Sentonorejo). Penentuan kawasan meso ini didasarkan pada (a) dugaan yang cukup kuat bahwa pusat kota berada di area sekitar jaringan kanal, (b) sebaran temuan terpadat ada di daerah ini, dan (c) intensitas ancaman terhadap kelestarianinggalan Majapahit di area ini paling tinggi
- **Tataran Mikro**, yang merujuk pada situs-situs yang cukup luas atau kluster (kelompok) situs yang saling berdekatan.

Tiga Aspek Pelestarian

Kebijakan pelestarian harus selalu mengacu pada tiga aspek pelestarian yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Ketiga aspek pelestarian tersebut harus diterapkan pada keragaman



Gambar 32. Sketsa Prinsip Batas Kawasan Meso

jenis warisan budaya bendawi yang terdapat di kawasan, yaitu budaya bendawi bergerak, budaya bendawi tak-bergerak, dan kawasan. Berikut ini adalah kebijakan umum dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan

Kebijakan Umum Perlindungan, ditujukan bagi budaya bendawi bergerak, budaya bendawi tak-bergerak, dan kawasan

- **Perlindungan terhadap budaya bendawi bergerak** (artefak dan ekofak) dilakukan dengan pendokumentasian (bentuk, tempat, dan konteks temuan), registrasi (pencatatan dalam daftar benda cagar budaya), konservasi (perawatan dan pengawetan), dan dijadikan koleksi (melalui seleksi) museum atau pihak lain

Konsep Pelestarian dan Pengembangan

yang berwenang. Koleksi ini kemudian dapat dipresentasikan kepada masyarakat melalui **museum tertutup** (*indoor-museum*) atau bentuk pameran lainnya.

- **Perlindungan terhadap budaya bendawi tak-bergerak (fitur dan situs)** dilakukan melalui pendokumentasian (bentuk, tempat, dan konteks temuan), registrasi (pencatatan dalam daftar benda cagar budaya), konservasi (perawatan dan pengawetan), dan pengamanan di tempat (proteksi in situ) yang selanjutnya dapat dipresentasikan kepada masyarakat sebagai **museum terbuka** (*outdoor-museum*).
- **Perlindungan terhadap kawasan** dilakukan melalui deliniasi (menetapkan batas-batas disertai dengan proses dokumentasi dan registrasi), zonasi (penentuan dan penataan ruang wilayah untuk perlindungan, yang biasanya terdiri dari zona inti dan penyangga) dan disertai dengan regulasi (menyusun, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan hukum untuk setiap zonasi). Kawasan yang dilindungi akan dipresentasikan kepada masyarakat dengan konsep **ekomuseum** (*eco-museum*), yang mengintegrasikan museum ruang dan museum terbuka yang ada di kawasan itu, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya (lihat penjelasan lebih rinci di bawah).

Kebijakan Umum Pemanfaatan, diutamakan untuk Pendidikan, penelitian dan Pariwisata

- **Pendidikan** : warisan budaya Majapahit dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran dan pendidikan. Masyarakat dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai luhur serta berbagai aspek kehidupan dan budaya Majapahit yang kompleks, sehingga dapat mengambil pelajaran yang berharga serta dapat meningkatkan pengetahuan, kearifan, dan penghargaan terhadap warisan budaya Majapahit maupun jatidiri bangsa Indonesia.
- **Penelitian** : warisan budaya Majapahit telah lama menjadi kajian para ahli. Banyak gagasan, pengetahuan, kearifan, dan berbagai aspek kehidupan yang telah diungkapkan dari warisan budaya yang ada. Namun, masih banyak aspek yang juga belum terungkap. Tinggalan Majapahit memiliki potensi yang luarbiasa untuk dapat menghasilkan informasi tentang masa lampau yang dapat dikaji secara multidisiplin. Karena itu, warisan budaya Majapahit dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
- **Pariwisata** : warisan budaya Majapahit sejak dulu telah menarik minat orang untuk berkunjung. Beragam temuan yang ada memberikan citra yang unik dan jarang ditemukan di tempat-tempat lain. Kawasan yang penuh dengan tinggalan Majapahit di sekitar Trowulan seringkali dipandang sebagai pusat kerajaan Majapahit. Konfigurasi temuan yang ada mencerminkan permukiman yang kompleks, dan barangkali merupakan sisa-sisa kota yang tertua di Indonesia. Karena itu, kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan wisata, khususnya wisata minat khusus

Pengembangan warisan budaya Majapahit dapat diarahkan untuk menjadi **jatidiri bangsa, inspirasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

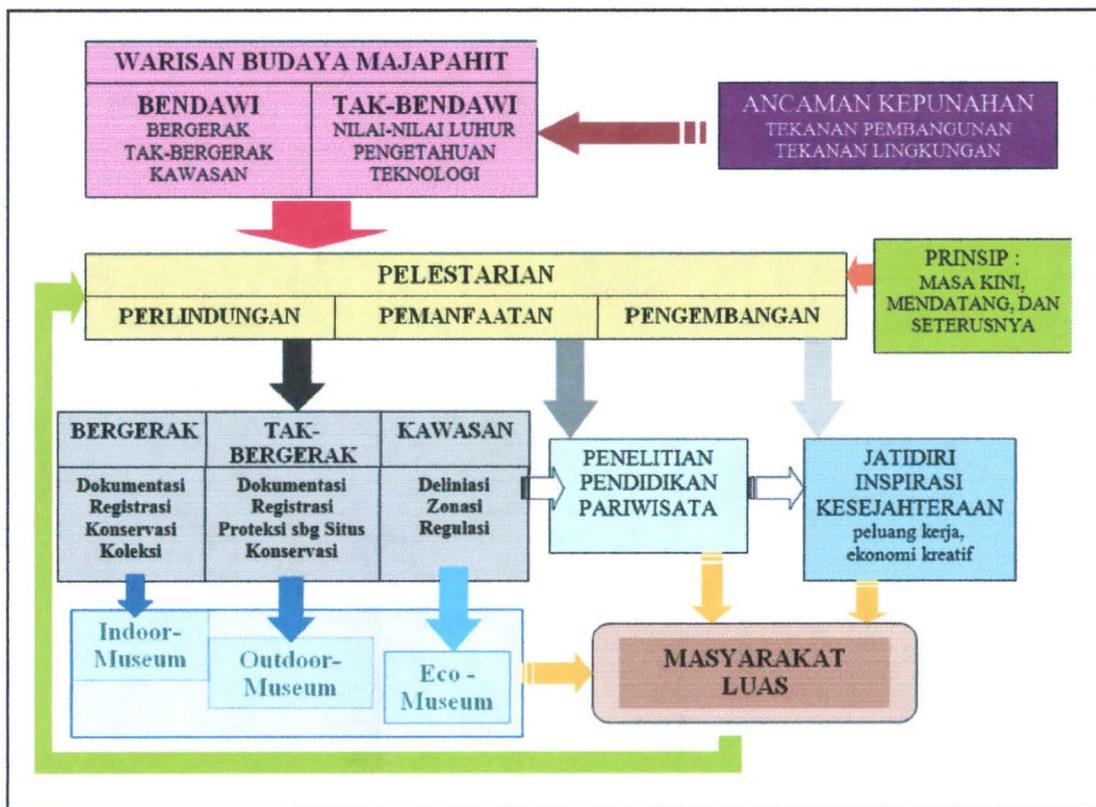
- **Jatidiri bangsa** : berbagai aspek kehidupan dan budaya Majapahit telah terbukti menjadi rujukan dalam menyusun Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk cakupan wilayahnya (nusantara), kelembagaan negara, kebijakan keragaman budaya (“*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*”), dan banyak istilah atau jargon dari jaman ini telah menjadi semboyan lembaga negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kerajaan Majapahit telah menjadi model bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Majapahit sudah menjadi salah satu sumber jatidiri bangsa Indonesia. Namun, sesungguhnya masih banyak warisan budaya tak-bendawi Majapahit dapat digali dan layak dikembangkan sebagai nilai-nilai luhur pembentuk watak bangsa (*national characters*). Berbagai capaian budaya tinggi Majapahit juga dapat dikembangkan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Karena itu, berbagai warisan budaya Majapahit harus tetap dilestarikan dan ditingkatkan nilai-nilai pentingnya, tidak saja sebagai pengetahuan sejarah, tetapi juga sebagai identitas atau jatidiri bangsa, di antaranya perpaduan budaya pertanian dan bahari, toleransi beragama, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan luar negeri.
- **Inspirasi** : warisan budaya Majapahit, baik bendawi maupun tak-bendawi, membuktikan peradaban tinggi Majapahit baik di bidang arsitektural, tata kota, jaringan kanal dan irigasi, teknologi, sastra, seni, dan kriya. Semua unsur budaya itu sangat bermutu dan layak dikembangkan menjadi ilham atau inspirasi bagi kehidupan di masa kini, di antaranya untuk kearifan lingkungan, ciri kehidupan kosmopolitan, tata wilayah, sastra, seni pertunjukan, seni kriya, dan kerajinan yang pada gilirannya akan menjadi pangkal tumbuhnya **ekonomi kreatif**.
- **Kesejahteraan masyarakat** : kawasan cagar budaya Majapahit sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata minat khusus. Apabila direncanakan dengan baik, kegiatan ini akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menarik kunjungan, penyajian warisan budaya Majapahit harus menarik dan memberikan pengalaman mengesankan. Upaya ini harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga mereka mendapat **peluang kerja baru**. Keterlibatan masyarakat sekaligus dapat menjadi sarana alih profesi bagi mereka yang kegiatannya selama ini berpotensi merusak warisan budaya Majapahit. Para pembuat bata dapat diberdayakan sebagai pemandu, pemilik rumah inap (homestay), pengusaha boga, perajin cinderamata, dan berbagai penyedia jasa lainnya. Para petani tradisional dapat diberdayakan menjadi petani hidroponik untuk menyediakan hasil kebun yang khas daerah Trowulan dengan nilai lebih. Bahkan, mereka juga dapat dilibatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelestarian berdasarkan konsep ekomuseum. Dengan demikian,

Konsep Pelestarian dan Pengembangan

keberadaan warisan budaya Majapahit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sumberdaya budaya itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semua kegiatan pelestarian dan pengembangan pada hakekatnya akan dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Apabila masyarakat merasakan manfaat dari upaya pelestarian dan pengembangan, dapat dipastikan mereka akan ikut berperan serta dalam upaya pelestarian warisan budaya Majapahit. Hal menjadikan upaya pelestarian akan terasa lebih berhasilguna.

**SKEMA ALUR PIKIR KONSEP PELESTARIAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA MAJAPAHIT**



BAB V

KEBIJAKAN KHUSUS DAN ARAHAN PROGRAM PELESTARIAN

Pada bab sebelum telah diuraikan mengenai konsep dan kebijakan umum pelestarian Kawasan Cagar Budaya Majapahit yang batas keruangannya telah ditentukan. Konsep dan kebijakan itu tentu harus diwujudkan secara lebih rinci dalam kebijakan khusus pada setiap jenis warisan budaya dan program-program kegiatan yang harus segera diselenggarakan. Kebijakan khusus memberikan gambaran lebih terinci pada bentuk pelestarian baik itu yang diterapkan pada warisan budaya bergerak di museum ruang, fitur dan struktur sebagai museum lapangan, dan juga kawasan yang telah ditentukan. Arah program kerja diharapkan dapat menjadi langkah-langkah nyata untuk mempersiapkan implementasi kebijakan yang sudah diambil.

A. KEBIJAKAN KHUSUS PELESTARIAN KAWASAN

Kawasan Makro sebagai Kawasan Strategis Nasional

Sebagaimana telah dikemukakan, warisan budaya Kerajaan Majapahit terbukti memiliki nilai-nilai penting bertaraf nasional. Karena itu, kawasan yang mengandung banyak tinggalan kerajaan ini harus ditetapkan statusnya sebagai **cagar budaya nasional**.

Sesuai dengan statusnya, dalam upaya pencapaian tujuan pelestarian, maka seluruh kawasan pelestarian yang batas-batasnya telah ditetapkan sebagai **Kawasan Makro harus ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional**, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama Pasal 5. Adapun fungsi utama kawasan ini adalah **kawasan lindung**, karena memang diperuntukkan terutama sebagai tempat pelestarian dan perlindungan bagi warisan

budaya Majapahit. Dengan penetapan ini, maka pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di kawasan ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Tentunya, dalam penataan ruang nantinya pemerintah pusat akan memperhatikan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kebijakan Pelestarian Kawasan berdasarkan Konsep Ekomuseum

Salah satu upaya melestarikan kawasan pelestarian warisan budaya Majapahit adalah mengembangkan kawasan tersebut dengan konsep Ekomuseum (lebih lanjut lihat penjelasan di bawah). Pada dasarnya ekomuseum adalah museum yang memadukan semua unsur yang ada di dalam lingkungannya, baik itu bentang alam, masyarakat (penduduk) dengan berbagai aspek sosial dan budayanya, maupun warisan budaya sebagai sajian utama museum tersebut. Dengan demikian, ekomuseum menyajikan suatu kesatuan kehidupan secara menyeluruh (holistik) yang dapat menunjukkan interaksi antara masyarakat, lingkungan alam, dan warisan budaya mereka. Ekomuseum dikembangkan sebagai jaringan museum ruang, museum situs (terbuka), tradisi budaya yang masih hidup (*living tradition*), dan sentra-sentra ekonomi tradisional maupun ekonomi kreatif yang ada di dalam kawasan pelestarian.

Dalam hal ini, masyarakat tidak diperlakukan sebagai “obyek” atau koleksi ekomuseum yang “dinikmati” oleh pengunjung, tetapi justru diposisikan sebagai “kurator” dari kehidupan dan warisan budaya yang mereka miliki. Mereka ikut serta memelihara dan melestarikan segala aspek kehidupan dan warisan budaya, sekaligus menjadi “pemandu” dan narasumber yang memberikan informasi langsung kepada pengunjung agar mereka memahami sajian (bagian-bagian) ekomuseum. Dalam konteks ini, anggota masyarakat yang kebetulan menemukan warisan budaya bendawi Majapahit (struktur atau situs) dapat tetap memiliki, melestarikan, dan mengembangkannya menjadi museum situs yang mereka kelola sendiri sebagai bagian dari ekomuseum. Mereka berhak mengambil keuntungan dari apa yang mereka sajikan, dengan tetap mematuhi ketentuan dan hukum yang terkait dengan pelestarian benda cagar budaya. Masyarakat juga dapat melestarikan tradisi budaya mereka (upacara, pertunjukan, kesenian, kerajinan) sebagai bagian dari daya tarik ekomuseum dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu.

Ciri-ciri Pengelolaan Kawasan berdasar Konsep Ekomuseum

Di masa kini, konsep museum tidak lagi harus merujuk pada koleksi dan pameran benda-benda, tetapi juga wujud yang tak-bendawi, baik berupa gagasan maupun tindakan. Karena itu, konsep museum juga tidak lagi terbatas pada bangunan dan koleksi, tetapi pada semua bentuk warisan budaya. Dalam pemahaman itulah, muncul konsep ekomuseum, yang kelahirannya dibidani oleh dua tokoh museologi asal Perancis Georges Henri-Riviere dan Hugo de Varine pada tahun 1971. Pada awalnya, konsep ekomuseum dibedakan dengan museum pada umumnya antara lain dari penafsiran di situs dan keterlibatan masyarakat setempat. Namun, ciri itu ternyata tidak mampu secara spesifik membedakan antara ekomuseum dan museum biasa, karena di museum biasa pun kedua unsur itu dapat dilakukan.

Konsep museum kemudian berkembang lagi. Ekomuseum lalu diakui sebagai suatu proses budaya yang dipahami bersama dengan komunitas (masyarakat) pada suatu wilayah dan menggunakan warisan budaya bersama sebagai sumberdaya untuk pembangunan. Ini tentu saja berbeda dengan museum pada umumnya yang selalu dikaitkan dengan koleksi dalam bangunan untuk kepentingan pengunjung (H. de Varine, 1996).

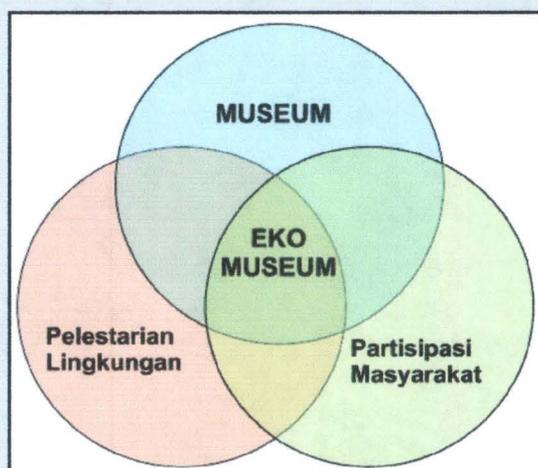
Museum	Ekomuseum
Benda koleksi	Warisan budaya bendawi dan tak bendawi
Bangunan	Situs atau Tempat dan lingkungan
Pengunjung	Masyarakat

Menurut Davis (1999), ciri-ciri ekomuseum dapat ditentukan dari perpaduan tiga unsur yang saling berpenampalan komunitas, museum, dan lingkungan baik sosial, budaya maupun fisik. Selain itu, juga ditandai dengan “rasa berada di suatu tempat” khas (a sense of place). Model tiga unsur ini lalu dikembangkan oleh K. Hoara dengan memberi penjelasan lebih rinci terhadap tiga unsur itu. Uraian kedua pakar itu tentang tiga unsur yang berkaitan dalam ekomuseum sesungguhnya dapat diperikan sebagai paduan unsur museum, pelestarian lingkungan (sosial, budaya, dan fisik setempat) dan partisipasi masyarakat.

- Museum pada umumnya melakukan fungsi-fungsi koleksi, melestarikan, meneliti, dan memamerkan yang dapat mendidik dan menghibur.
- Pelestarian lingkungan berupaya untuk mempertahankan keberadaan setiap aspek lingkungan sosial, budaya, dan fisik.
- Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan komunitas dalam memaknai, melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan warisan yang ada untuk kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa falsafah dasar penerapan konsep ekomuseum harus mencirikan hal-hal berikut.

- Ekomuseum hadir untuk melindungi kawasan dan menjelaskan warisan budaya
- Tanah (kawasan) tempat ekomuseum merupakan warisan budaya yang diatur dan dikelola sesuai dengan hak-hak tradisional masyarakat
- Peduduk setempat harus ikut berperan serta dalam kegiatan museum yang harus didasarkan pada ciri budaya masyarakat itu sendiri
- Segala usaha diupayakan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya potensi-potensi yang dihasilkan oleh penelitian ilmiah bagi pelestarian warisan budaya yang harus tetap berada di tempatnya



Secara lebih sederhana Maggi (2002) menjelaskan ekomuseum sebagai museum khusus yang pengelolaannya didasarkan pada kesepakatan yang memberikan kewenangan bagi komunitas setempat untuk melestarikan suatu tempat, yang di dalamnya terkandung warisan budaya. Kesepakatan diartikan sebagai komitmen jangka panjang yang tidak selalu dilandasi oleh ketentuan hukum. Komunitas setempat (lokal) adalah pemerintah daerah dan masyarakat setempat bekerja bersama-sama. Melestarikan berarti memiliki komitmen dan visi ke masa depan untuk pembangunan setempat. Sementara itu, tempat adalah nilai-nilai budaya, sosial, dan lingkungan yang berlapis-lapis yang menjadikan warisan budaya itu unik.

Mengikuti pendapat Riviere, ada beberapa ciri utama ekomuseum.

- Ekomuseum harus di konsepsi dan dirancang oleh lembaga yang bertanggung jawab bersama-sama dengan penduduk setempat untuk memelihara warisan budaya dan menjadi alat untuk memenuhi minat bersama
- Di ekomuseum, baik pengunjung maupun penduduk setempat akan dapat berkaca tentang hubungan penduduk setempat dengan lingkungannya
- Menunjukkan hubungan alami antara manusia dengan alam
- Mampu mencerminkan masa sejarah yang panjang, dari sejak masa prasejarah hingga kini
- Menawarkan tempat khusus istimewa untuk mereka yang ingin berkunjung sejenak maupun beberapa lama
- Menjadi laboratorium tempat penelitian yang dapat menyumbangkan pengetahuan tentang lingkungan masa kini dan masa lampau
- Menjadi pusat perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian jatidiri budaya atau kemanusiaan, maupun warisan alam
- Menjadi sekolah, tempat penelitian lebih lanjut, upaya pelestarian, dan mampu mendorong penduduk setempat untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri.

Ekomuseum harus ditandai dengan adanya peran pemberdayaan dan pembangunan masyarakat setempat dalam mengelola warisan budaya, terutama yang berada pada lingkungan pedesaan (Boylan, 2006). Dalam rangka pelestarian, **maka amat penting untuk mempertahankan suasana lingkungan pedesaan di seluruh kawasan ini.**

Konsep-konsep di atas akan menjadi dasar pelestarian pada tingkat Kawasan Cagar Budaya Majapahit pada tingkat makro dan meso.

Konsep Pemintakatan

Sesuai dengan amanat UU RI no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP no. 10 Tahun 1993 sebagai Pelaksanaan UU tersebut, maka dalam rangka perlindungan terhadap warisan budaya bendawi harus dilakukan pemintakatan. Pada umumnya pemintakatan akan terdiri atas mintakat inti untuk perlindungan mutlak dan mintakat penyangga sebagai lingkungan pendukung perlindungan.

Konsep pemintakatan sebagaimana yang diamanatkan di atas, akan juga diterapkan pada Kawasan Cagar Budaya Majapahit dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

B. KEBIJAKAN KHUSUS PELESTARIAN FITUR DAN SITUS

Warisan budaya bendawi tak-bergerak membutuhkan penanganan khusus agar kelestariannya dapat terjamin. Secara garis besar, kebijakan terhadap jenis warisan budaya ini terdiri dilakukan melalui proses dokumentasi, registrasi, konservasi (perawatan dan pengawetan), dan pengamanan di tempat (proteksi *in situ*) dan dipresentasikan sebagai **museum terbuka (*outdoor-museum*)**.

Pada dasarnya museum terbuka (*outdoor museum*, *site museum*, atau *open air museum*) adalah lebih merujuk pada dua pemahaman. Pertama, museum yang didirikan di dekat atau di lingkungan situs sebagai sarana penunjang untuk memahami seluk beluk situs. Pemahaman kedua lebih merujuk pada situs itu sendiri yang dianggap atau dipergunakan sebagai museum. Meskipun demikian, kedua istilah itu selalu menyaratkan kedekatan "konteks" dengan situs yang sebenarnya. Ciri inilah yang membedakan museum situs dengan museum lainnya. **Jadi, museum situs harus selalu mampu menyajikan konteks asli (*authentic*) dari informasi yang hendak disampaikan.**

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka fitur atau situs dapat berperan sebagai koleksi museum terbuka. Koleksi ini tentu perlu diberi informasi agar pengunjung dapat memahami makna dan nilai penting koleksi yang ditampilkan. Apabila dirasakan perlu, informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk museum tertutup berukuran kecil. Namun, informasi dapat pula disajikan dalam tampilan-tampilan terbuka.

Karena koleksi museum terbuka tidak lain adalah fitur dan struktur yang menjadi bagian dari situs itu sendiri, maka kebijakan khusus yang diterapkan pada warisan budaya didasarkan pada bentuk-bentuk pelestarian yang memungkinkan, sesuai dengan keadaan dan nilai penting masing-masing warisan budaya ini. Beberapa bentuk upaya pelestarian yang dapat diterapkan pada warisan budaya ini antara lain sebagai berikut.

Pengamanan, yaitu upaya mengamankan dan menyelamatkan warisan budaya yang terancam hilang atau rusak akibat kegiatan alam atau manusia. Dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan fisik, pemindahan, ekskavasi penyelamatan (*rescue/salvage excavation*), serta perekaman (*preserved by record*)

Pemeliharaan, yaitu upaya melindungi dan merawat warisan budaya secara terus menerus agar unsur bahan, isi, dan latar lingkungan (*setting*) tidak mengalami kerusakan atau hancur

Perlindungan (*Preservation*), yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan agar dapat mempertahankan kondisi bahan warisan budaya

Perbaikan (*Repair*), yaitu upaya untuk mengembalikan keadaan warisan budaya agar mendekati bentuk semula. Perbaikan dapat dilakukan dengan pemugaran (*restorasi*) atau bina ulang (*rekonstruksi*)

Pemugaran (*Restorasi*), yaitu upaya mengembalikan warisan budaya ke bentuk semula yang diketahui dengan menghilangkan unsur-unsur baru yang pernah ditambahkan dan menyusun kembali berdasarkan bahan-

bahan asli tanpa penambahan bahan baru

Bina Ulang (Rekonstruksi), yaitu upaya mengembalikan keadaan warisan budaya agar dapat mendekati bentuk semula, dengan menambahkan bahan-bahan baru

Penggunaan kembali yang sesuai (Adaptive re-use), yaitu melestarikan dengan memanfaatkan warisan budaya untuk kegiatan yang sesuai. Untuk itu dapat dilakukan perubahan-perubahan dengan syarat antara lain tidak mengakibatkan merosotnya nilai penting atau kerusakan pada bagian-bagian yang mempunyai nilai penting; perubahan harus memungkinkan pengembalian ke keadaan semula tanpa menimbulkan kerusakan (reversible); dan perubahan yang hanya berdampak sangat kecil (minimal).

Sebagai museum terbuka atau museum situs, suasana museum harus diciptakan agar dapat dinikmati dengan menyenangkan oleh pengunjung. Karena itu, perlu penataan lingkungan yang baik, termasuk di dalamnya penataan pada beberapa unsur di bawah ini.

- **Tataruang dan tata kunjungan (visitor flow).** Hendaknya ada pengaturan pengunjung yang baik dengan memperhatikan dan mengikuti garis urutan cerita (story-line) yang disajikan. Hal ini terkait erat tidak hanya pada kemudahan dan keruntutan informasi yang disajikan, tetapi juga dari kenyamanan menikmati. Pengaturan pengunjung yang tidak tepat akan menurunkan kenyamanan dan tidak tertutup kemungkinan bisa menimbulkan keributan. Dalam konteks ini juga perlu disediakan ruang-ruang yang cukup agar interaksi antara pengunjung dengan benda yang dipamerkan dan informasi lain yang ada di baliknya dapat dilakukan dengan lebih baik. Kerumunan-kerumunan pada tampilan tertentu yang lebih menarik akan mengurangi kenyamanan dan daya serap untuk memahami informasi yang disajikan. Pengaturan pengunjung juga dapat dikaitkan dengan kelestarian sumberdaya arkeologi yang ada di museum situs. Cara penyajian tampilan yang tidak teratur dapat menimbulkan resiko tinggi kerusakan benda-benda yang ditampilkan karena sentuhan, benturan, dan tabrakan tak sengaja antar pengunjung dan antara pengunjung dengan benda tampilan. Hal ini dapat dihindari jika tanda-tanda yang ada cukup memadai, terutama jika museum situs cukup luas. Tanda-tanda petunjuk arah maupun keterangan khusus di tempat-tempat penting dan strategis akan sangat membantu proses pemahaman informasi tentang situs itu.
- **Penyajian informasi yang memadai.** Aspek penting dalam menyajikan informasi pada museum situs adalah aspek estetika. Cara menyajikan informasi yang diberi nuansa seni akan menjadi tidak membosankan. Hal ini erat kaitannya dengan cara-cara memvisualisasikan informasi. Uraian secara verbal seringkali tidak menarik pengunjung, karena itu dibutuhkan sentuhan seni untuk menciptakan efek-efek audio-visual yang menambah pendalaman penghayatan materi yang disajikan. Di masa kini, bantuan alat-alat multi media yang ditempatkan pada posisi-

posisi yang tepat. Namun demikian, akurasi informasi tidak boleh dikorbankan hanya untuk mengejar penyajian yang asri. Lagipula, sedapat mungkin museum situs menyajikan benda-benda yang asli, karena keunggulan museum situs dibandingkan museum-museum lain adalah "penyajian benda-benda asli dalam konteks-nya yang asli juga".

- **Masalah Interpretasi.** Karena pengunjung di museum terbuka berhadapan langsung dengan warisan budaya, informasi yang disajikan dapat saja bersifat deskriptif faktual, sehingga memberikan kesempatan pengunjung untuk mencoba menafsirkan sendiri benda yang ditemui dalam batas-batas tertentu. Kurator seakan membiarkan pengunjung menafsirkan apa yang ada sesuai dengan pikiran dan imajinasinya sendiri. Alternatifnya, informasi yang disajikan sudah mengandung tafsiran yang tentu saja dalam konteks persepsi tertentu. Sikap seperti ini biasanya akan menghasilkan sajian informasi yang cukup lengkap dan rinci, sehingga memudahkan pengunjung untuk memahami dan menghayati lebih baik. Namun, tentu saja pengunjung tidak mempunyai kesempatan menafsirkan tampilan menurut mereka sendiri.

- Estetika lingkungan melalui penataan tanaman dan bangunan akan memberikan dan membangun suasana yang lebih baik, agar kunjungan tidak sekedar wisata tetapi juga memiliki nuansa pendidikan dan apresiasi budaya

- **Muatan Pendidikan** Fungsi museum yang utama adalah sebagai sarana pendidikan. Fungsi ini akan dapat tercapai apabila informasi yang disajikan cukup memadai. Dalam kaitan dengan tujuan ini, hendaknya ada beberapa komponen informasi yang disajikan dengan memadai. Pertama, informasi berupa pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan situs. Layaknya, informasi yang diberikan harus mampu memberikan pengetahuan tentang konteks sejarahnya, nilai penting situs, dan aspek-aspek penting lain dari setiap benda atau suasana yang ditampilkan. Kedua, informasi tentang sejarah penelitian situs, termasuk cara-cara penelitian atau metodologi yang pernah diterapkan di situs untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan situs. Komponen informasi ini memegang peran penting untuk menumbuhkan apresiasi terhadap arkeologi dan ilmu-ilmu lain yang telah berperan dalam mengungkapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan situs. Museum situs seharusnya juga menyampaikan informasi atau pesan yang dapat menumbuhkan apresiasi terhadap masa lampau. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan aspek-aspek yang diungkapkan dengan masa kini. Dengan kata lain, museum situs sedapat mungkin memberikan konteks baru pada warisan budaya yang disajikan. Dengan cara yang disebut *kontekstualisasi* ke masa kini, museum situs telah berperan sebagai agen atau perantara revitalisasi nilai-nilai masa lampau di masa kini. Museum situs diharapkan juga dapat menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan pelestarian, sehingga pengalaman yang diperoleh oleh pengunjung selama berada di situs dan museum situs mempunyai

efek '*snow balling*' bagi upaya-upaya pelestarian.

- **Konservasi.** Sebagaimana yang telah dikemukakan, museum situs yang baik akan dapat menyajikan 'benda asli dalam konteks asli'. Sementara itu, salah tujuan museum adalah melestarikan benda-benda itu. Karena itu, aspek konservasi menjadi hal yang amat penting dalam pengelolaan museum situs. Seakan, bidang konservasi ditantang untuk terus menemukan cara-cara agar benda-benda asli yang dipertahankan dalam konteks asli itu tidak mengalami degradasi atau pelapukan dan kerusakan baik secara khemik maupun fisik. Tidak jarang, benda-benda asli tersebut harus terbuka terhadap faktor-faktor penyebab pelapukan karena berada di tempat terbuka (*open-site*). Dalam situasi seperti itu, bidang konservasi harus dapat mencari cara-cara konservasi yang sedapat mungkin mengawetkan benda dengan tetap mempertahankan keaslian konteks atau "suasana" yang menyelimuti benda-benda tersebut. Dengan begitu, proses konservasi pada museum situs tidak saja dilakukan terhadap benda tetapi juga latar konteksnya, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan juga konteks bentang alam yang lebih luas di sekeliling situs tersebut.
- **Kesiapan terhadap bencana (*disaster preparedness*).** Aspek ini perlu segera mendapat perhatian yang selayaknya, karena kawasan Trowulan termasuk rawan bencana. Perlu dikembangkan cara-cara penanganan museum dalam menghadapi bencana. Kesiapan terhadap bencana ditujukan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin benda atau sajian dalam museum situs dan situsnya, maupun untuk penyelamatan bagi pengunjung. Kesiapan untuk keselamatan benda dan situs dapat dilakukan dengan memasang dan menyiapkan sarana perlindungan atau pencegahan, antara lain menetapkan aksesibilitas pemadam kebakaran, jaringan peringatan dini (alarm) dan penyemprot air otomatis (automatic water sprayer). Untuk penyelamatan pengunjung, perlu diatur pintu darurat, serta jalur pengungsian atau evakuasi.

C. KEBIJAKAN KHUSUS PELESTARIAN DI MUSEUM RUANG

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, warisan budaya bendawi bergerak pada prinsipnya dilestarikan dengan cara menjadikan benda-benda tersebut koleksi museum ruang (*indoor museum*). Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh International Council of Museums (ICOM), museum adalah lembaga nirlaba yang permanen untuk melayani masyarakat, terbuka bagi umum, dengan tugas mendapatkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan koleksi bukti bendawi budaya manusia dan lingkungannya dalam rangka pengkajian, pendidikan, dan kesenangan masyarakat.

Untuk dapat menjadi koleksi museum, warisan budaya bendawi bergerak akan melalui proses seleksi, sebagaimana yang diatur dalam perangkat undang-undang yang berlaku di

Indonesia di antaranya UU RI no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, PP no. 10 tentang Pelaksanaan UU no. 5 Tahun 1992, PP no. 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan BCB di Museum, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan benda Cagar Budaya dan/atau Situs.

Kebijakan khusus yang diterapkan untuk pengembangan museum ruang di Kawasan Cagar Budaya Majapahit adalah sebagai berikut.

- Museum harus dapat menjadi sarana pendidikan yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kebanggaan nasional
- Museum dikembangkan sebagai pusat informasi, dokumentasi, dan konservasi tinggalan-tinggalan Masa Majapahit
- Museum harus dapat menjadi sarana pengkajian sejarah Majapahit
- Museum harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan sekaligus sarana rekreasi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, regional, maupun internasional
- Museum menampilkan informasi yang memadai tentang keunggulan budaya Majapahit sebagai bagian dari sejarah peradaban manusia, khususnya sejarah bangsa Indonesia

Dalam rangka melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya Majapahit (warisan budaya tak-bendawi) maupun nilai-nilai penting warisan budaya bendawi, museum harus mampu menyajikan informasi yang menarik, mendidik, dan menghibur. Dengan demikian, pewarisan nilai-nilai tersebut akan berjalan melalui proses menyenangkan dan alami. Sesuai dengan tujuan penyajian informasi tersebut, pameran utama museum setidaknya dapat menampilkan berbagai aspek budaya Majapahit yang dapat memberi gambaran tentang pencapaian budaya Majapahit yang adiluhung.

Tampilan dapat disajikan dengan

- memadukan aspek kronologis dengan tematis, sehingga pengunjung mendapat gambaran yang cukup lengkap tentang sejarah dan rona kehidupan pada masa itu,
- memuat pelajaran-pelajaran yang berharga dan unsur pendidikan yang membangkitkan kebanggaan serta menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Urutan pengisahan (stroyline) pameran di museum dan pusat informasi Majapahit dapat disusun dengan pola sebagai berikut.

1. **Pra-Majapahit** : memberikan gambaran secara sangat singkat tetapi informatif tentang keadaan di Jawa sebelum munculnya Kerajaan Majapahit. Sekilas kehidupan selama Masa Prasejarah di Jawa Timur sebelum masa sejarah, dengan menampilkan beberapa tinggalan/bukti dari masa prasejarah beserta interpretasinya. Di antaranya fosil-fosil hewan dan manusia purba, situs gua, situs perbengkelan neolitik, dan situs megalitik
2. **Masa Sejarah Pra-Majapahit** : memberikan gambaran sejarah singkat kerajaan-kerajaan Jawa yang telah ada sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Tampilan terdiri dari tinggalan masa kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah, termasuk Candi Badut, hingga perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur (Masa Mpu Sindok). Kemudian dilanjutkan dengan gambaran lebih rinci tentang kerajaan Kahuripan (Airlangga) hingga kerajaan Singasari, yang berakhir dengan serangan tentara Tartar ke Jawa Timur.

Kedua tampilan ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa Majapahit pada dasarnya adalah puncak perkembangan sejarah Jawa. Pengunjung diharapkan dapat memahami akar-akar sejarah dan budaya yang menumbuhkannya. Pendirian Majapahit bukan peristiwa yang tiba-tiba ada, tetapi merupakan proses yang panjang.

3. **Awal Majapahit** : memberikan gambaran sejarah pendirian kerajaan Majapahit, mulai pembukaan hutan Tarik oleh Raden Wijaya, pengangkatan Raden Wijaya menjadi raja Majapahit yang pertama dan berbagai peristiwa sejarah penting hingga pemerintahan Raja Tribhuwanatunggadewi.

Tampilan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi besar dibangun sejak awal dengan kerja keras.

4. **Kejayaan Majapahit** : memberikan gambaran keadaan Majapahit di masa kejayaannya, khususnya pada masa pemerintahan Hayamwuruk dan Patih Gajah Mada, dilanjutkan dengan masuknya pengaruh Islam, dan berbagai peristiwa-peristiwa menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit. Gambaran peristiwa sejarah ini harus ditunjang dengan tinggalan-tinggalan yang ada.

Tampilan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa upaya dan kerja keras akan menghasilkan kebesaran, seperti telah ditunjukkan oleh sejarah Majapahit.

5. **Hubungan Dalam Negeri** : mengungkapkan aspek-aspek yang dapat menunjukkan peran Majapahit di Nusantara, di antaranya hubungan dengan daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia sebagaimana dituliskan dalam Nagarakrtagama/Desawarnana, serta hubungannya yang khusus dengan Sumatra dan Bali.

Tampilan ini diharapkan dapat menjelaskan kebesaran Majapahit sebagai negara yang pernah "mempersatukan" Nusantara

- 6. Hubungan Luar Negeri :** mengungkapkan hubungan Majapahit dengan daerah-daerah lain terutama dengan Campa, Cina, India, dan Arab. Strategi diplomasi sehingga kerajaan ini diakui perlu diungkapkan, disertai dengan bukti-bukti artefaktualnya.

Tampilan ini diharapkan dapat menunjukkan kedudukan dan hubungan Majapahit dengan berbagai daerah di luar kekuasaan kerajaan itu sendiri, dengan menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang setara dengan dan dihargai oleh kerajaan lain semasanya.

- 7. Tampilan Tematik** yang dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan Majapahit yang bersifat keseharian maupun yang mempunyai nilai-nilai tinggi. Penyajian tidak perlu berturutan tetapi pengunjung dapat secara lebih bebas memilih aspek-aspek yang hendak dilihat terlebih dahulu.

Tampilan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kehidupan pada Masa Majapahit secara umum, terutama berupa keunggulan-keunggulan di bidang tertentu, sehingga menimbulkan rasa kagum dan menggugah keinginan untuk meneladani kinerja unggul di masa lampau. Beberapa aspek budaya tinggi Majapahit yang dapat ditampilkan antara lain

- a. Tata Kota
- b. Religi
- c. Peralatan dan teknologi
- d. Sistem Ekonomi
- e. Sistem Pengetahuan
- f. Bahasa dan Sastra
- g. Kesenian
- h. Sistem Kemasvarakatan

8. Ruang Inspirational

Menyajikan tampilan yang dapat menjadi penghubung atau benang merah antara masa Majapahit dengan negara RI sekarang. Suatu upaya kontekstualisasi Majapahit ke masa kini. Informasi ini dapat disampaikan dengan memberikan penjelasan kontekstual-historis penggunaan konsep-konsep yang dirumuskan pada masa Majapahit dapat menjadi ilham bagi beberapa konsep kenegaraan Republik Indonesia. Di antaranya : kaitan Sumpah Palapa dengan Satelit Palapa dan Wawasan Nusantara, kaitan antara istilah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Mangrwa dengan semboyan negara RI dan Lemhanas, kaitan antara bhayangkari dengan kepolisian. Dalam konteks ini, sejarah munculnya atau latarbelakang penggunaan kembali istilah tersebut beserta tokoh-tokoh yang menggali khasanah konseptual Majapahit (misalnya Mohammad Yamin dan Soekarno) harus dikisahkan.

Tampilan di ruang ini diharapkan dapat menjadi sarana kontemplasi dan refleksi hubungan antara Majapahit dan negara RI. Dengan tampilan ini, diharapkan nilai-nilai luhur yang ada di Masa Majapahit direvitalisasi untuk memotivasi pengunjung untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, diharapkan tampilan ini dapat mengingatkan kembali akan jati diri bangsa Indonesia.

Kebutuhan Fasilitas Museum dan Pusat Informasi Majapahit

Dalam rangka penyajian informasi yang menarik, inspirational, dan menyenangkan, museum dan pusat informasi Majapahit harus memiliki gedung museum yang memadai. Letak museum harus strategis. Gedung museum harus dirancang dengan penuh makna filosofis yang mencerminkan nilai-nilai luhur Majapahit dengan gaya arsitektur yang khas dan mengandung unsur budaya Majapahit, sehingga akan dapat menjadi “ikon” bagi keberadaannya.

Gedung dan prasarana yang memadai seharusnya dapat menyediakan kebutuhan museum.

- **Ruang Persiapan** : ruang besar (hall) yang pertama dimasuki oleh pengunjung. Di ruang ini pengunjung disiapkan untuk memasuki ruangpameran dan menikmati tampilantampilan.
- **Ruang Pamer Utama**
- **Ruang Pamer Temporer**
- **Ruang Multimedia/Lecture Theater**, untuk menayangkan film-film yang berkaitan dengan Majapahit dan dapat dipakai sebagai tempat untuk ceramah atau seminar tertentu
- **Ruang Perpustakaan** : ruang baca dan ruang penyimpanan buku serta dokumen yang berkaitan dengan masalah Majapahit. Fasilitas ini untuk menunjang museum sebagai pusat informasi Majapahit.
- **Ruang Penyimpanan Koleksi** untuk menyimpan koleksi museum yang tidak di pameran, baik berupa ruang terbuka maupun tertutup.
- **Studio Preparasi** : untuk mempersiapkan tampilan-tampilan, baik untuk pengganti pameran utama maupun pameran temporer.
- **Ruang Laboratorium** : untuk perawatan, pengawetan, dan perbaikan koleksi yang harus didukung dengan berbagai peralatan analisis kimiawi dan pembuangan limbah yang memadai
- **Sarana penunjang**, antara lain toilet dalam dan luar, mushola, kafe, teater terbuka, gerai cinderamata, kantor tiketing, dan ruang kesehatan
- **Area Terbuka** : yaitu lokasi-lokasi di luar gedung yang ditata sebagai bagian dari pameran utama untuk menyajikan benda-benda koleksi yang dapat dan aman untuk ditempatkan di tempat terbuka. Di sini dapat disediakan sarana bermain untuk anak serta simulasi-simulasi yang meningkatkan apresiasi terhadap kerja arkeologi, misalnya : simulasi penggalian, pembuatan gerabah, permainan tradisional, dan beberapa bentuk kegiatan semacamnya.
- **Tempat Parkir dan pos pengamanan**
- **Kantor pengelola/administrasi**

D. PENANGANAN MASALAH UTAMA

Sebagaimana telah dikemukakan, warisan budaya Majapahit saat ini menghadapi ancaman kerusakan yang serius. Beberapa masalah utama penyebab ancaman dapat dirangkum menjadi beberapa isu strategis yang harus segera ditanggulangi agar ancaman kerusakan dapat segera diredakan dan dicarikan upaya pemecahannya. Kebijakan khusus yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah dapat dirisalahkan dalam tabel berikut ini

Isu Strategis	Prinsip Pemecahan Masalah
Matapencarian penduduk setempat yang cenderung mengubah lahan (pertanian, pembuatan bata)	<ul style="list-style-type: none">• Alih profesi melalui penyediaan peluang kerja baru yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya (a.l. pariwisata, ekomuseum, ekonomi kreatif)• Penerapan teknologi pertanian dengan pengolahan lahan terbatas dengan hasil bernilai ekonomis lebih tinggi (a.l. pilihan jenis tanaman yang lebih sesuai, pertanian hidroponik)
Kesengajaan mencari artefak Majapahit yang dapat dijual sebagai benda antik	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan masyarakat• Alih profesi• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum• Kebijakan insentif dan disinsentif
Kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Penataan ruang• Menetapkan dan menegakkan regulasi tataguna lahan sebagai upaya pengendalian penggunaan lahan
Kurangnya kesadaran berwarisan budaya dan perbedaan tafsir nilai penting warisan budaya Majapahit	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi status Kawasan Strategis Nasional dan nilai penting warisan budaya Majapahit pada aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat• Pertemuan-pertemuan konsultatif antar komponen masyarakat untuk membangun kehidupan yang didasari oleh rasa kebersamaan, keterbukaan, penuh toleransi positif, dan kesadaran pluralistis (a.l. melalui <i>participatory rural appraisal</i>)• Masukkan pendidikan warisan budaya (<i>heritage education</i>) sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, setidaknya di tingkat kabupaten (Mojokerto dan Jombang).
Kurangnya manfaat warisan budaya bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang kerja dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya (homestay, kuliner, kerajinan, kesenian)• Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan penelitian melalui program Ekomuseum (lihat penjelasan di bawah)

<p>Tidak adanya kebijakan, strategi, dan manajemen pelestarian yang jelas dan terarah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana induk pengelolaan kawasan dan melaksanakan secara konsisten • Menetapkan Badan Pengelola Kawasan • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola warisan budaya
<p>Ancaman karena penurunan kualitas lingkungan (a.l. global warming, polusi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan zona penyangga untuk menjauhkan kawasan pelestarian dari pusat-pusat industri yang menghasilkan polusi tinggi • Menerapkan kebijakan dan implementasinya untuk mempertahankan suasana pedesaan • Meningkatkan upaya konservasi warisan budaya bendawi (termasuk pemantauan kondisi warisan budaya) • Menumbuhkan dan mengembangkan kearifan lokal terkait dengan kelestarian lingkungan hidup

BAB VI

PENUTUP

Sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya bangsa Indonesia tidak pernah akan melupakan sejarah. Apalagi sejarah Kerajaan Majapahit yang telah diakui sebagai salah satu kerajaan yang sanggup menyatukan Kepulauan Nusantara. Salah satu wujud sikap untuk tidak melupakan sejarah Majapahit adalah melestarikan warisan budaya kerajaan besar itu, baik itu berupa nilai-nilai budayanya maupun tinggalan bendawinya. Apabila warisan budaya itu lestari, maka keberadaan Majapahit juga akan dapat dikenang dan mengilhami bangsa Indonesia. Sebaliknya, jikalau warisan budaya itu hilang dan musnah, maka sejarah Majapahit hanya akan menjadi legenda atau dongeng bagi generasi mendatang. Mereka tidak akan lagi menemukan bukti-bukti nyata keberadaan Kerajaan Majapahit yang pernah mengalami jaman keemasan pada sekitar abad ke-14 Masehi ini. Karena itu, pelestarian warisan budaya Majapahit menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia.

Ketiadaan konsep yang jelas dan mampu menjadi panduan pelestarian menjadi salah satu kendala untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya Majapahit. Berbagai upaya pelestarian yang telah diusahakan terbukti belum cukup mampu memberikan hasil yang nyata. Tinggalan Majapahit yang terserak di berbagai tempat kini semakin terancam oleh tekanan pembangunan, kependudukan, dan juga perencanaan pengembangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian. Tidak jarang, keinginan yang luhur untuk melestarikan warisan budaya Majapahit justru menimbulkan ancaman yang cukup serius terhadap keberadaan warisan budaya tersebut, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan untuk

pengembangan wilayah yang dapat dijadikan museum lapangan dan sebagai data dasar bagi sistem pemintakatan.

- Sosialisasi konsep museum lapangan kepada masyarakat setempat
- Kajian persepsi masyarakat tentang warisan budaya Majapahit, pemahaman tentang pelestarian warisan budaya, prosedur ganti rugi, dan ketersediaan untuk berpartisipasi dalam pelestariannya.
- Program rekayasa sosial untuk pemberdayaan masyarakat (*social engineering*) dalam rangka persiapan untuk pelestarian berbasis masyarakat (*community-based conservation*), terutama pada masyarakat yang tinggal tidak jauh dari situs yang berpotensi menjadi museum lapangan

Program Pelestarian Kawasan

- Persiapan memperoleh status Kawasan Strategis Nasional
 - Pemetaan dan penetapan batas-batas kawasan pelestarian secara lebih rinci dan cermat, dengan identifikasi keberadaan warisan budaya bendawi maupun tak bendawi
 - Mengambil langkah administrasi dan hukum yang diperlukan untuk memulai proses pengusulan kawasan cagar budaya Majapahit sebagai Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Pemetaan potensi sosial budaya ekonomi yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan konsep pelestarian warisan budaya dengan penerapan prinsip pengembangan ekomuseum
- Pendokumentasian dan penelitian kondisi fisik jaringan kanal dan potensi untuk dilestarikan dan direvitalisasi
- Penjaringan pendapat masyarakat setempat tentang alih profesi sebagai alternatif pekerjaan pengolahan lahan yang menimbulkan dampak pada kelestarian kawasan
- Kajian persepsi masyarakat setempat yang terkait dengan pemahaman mereka tentang pembangunan, kesejahteraan, dan tata kehidupan yang diharapkan yang hasilnya sangat dibutuhkan untuk penentuan kebijakan dalam pengembangan wisata ekologi
- Sosialisasi konsep ekomuseum untuk memperoleh tanggapan (feedback) dari masyarakat maupun semua pengampu kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan ekomuseum.
- Identifikasi dan kajian kearifan lokal, terutama yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, dalam rangka memanfaatkan kearifan tersebut untuk pelestarian warisan budaya

